



**PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KEDIRI
(PENDEKATAN INTERAKSI GEOSPASIAL)**

SKRIPSI

Oleh

**Robby Pratama
NIM 15081010148**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KEDIRI
(PENDEKATAN INTERAKSI GEOSPASIAL)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Robby Pratama
NIM 150810101048**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Puji Kasiani, terima kasih atas doa, kasih sayang, nasehat, ketulusan, dukungan, kesabaran, pengorbanan dan keikhlasan yang selalu diberikan untukku;
2. Saudara – saudara tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan;
3. Dosen-Dosen Fakultas Ekonomi dan Universitas Jember yang tidak pernah lelah berbagi dan menyalurkan ilmunya;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Jember;
5. Guru-guruku sejak Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah:286)

“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan;
tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya”

(Joseph Addison)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robby Pratama

NIM : 150810101048

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Penentuan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Pendekatan Interaksi Geospasial)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 April 2019

Yang menyatakan,

Robby Pratama
NIM 150810101048

SKRIPSI

**PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KEDIRI
(PENDEKATAN INTERAKSI GEOSPASIAL)**

Robby Pratama

NIM 150810101048

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penentuan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Pendekatan Interaksi Geospasial)

Nama Mahasiswa : Robby Pratama

NIM : 150810101048

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Tanggal Persetujuan : 16 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si
NIP. 197409132001122001

Ketua Jurusan,

Dr. Riniati, M.P
NIP 196004301986032001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KEDIRI
(PENDEKATAN INTERAKSI GEOSPASIAL)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Robby Pratama

NIM : 150810101048

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

3 Mei 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. **Ketua** : **Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si.** (.....)
NIP. 19700206 199403 1 002
2. **Sekretaris** : **Dr. Moh. Adenan, M.M** (.....)
NIP. 19661031 199203 1 001
3. **Anggota** : **Drs. P. Edi Suswandi, M.P** (.....)
NIP. 19550425 198503 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Foto 4 X 6
warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

Penentuan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri
(Pendekatan Interaksi Geospasial)

Robby Pratama

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persebaran sarana fasilitas umum yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri dan seberapa besar kekuatan interaksi spasial antara daerah yang ditentukan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kediri, serta pemetaan dengan menggunakan arcGIS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Skalogram, Indeks Sentralitas, Model Gravitasi, dan Metode Pemetaan arcGIS. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua kecamatan yang menjadi daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik yaitu Kecamatan Pare dengan nilai sentralitas sebesar 196,24 dan Kecamatan Ngasem dengan nilai sentralitas sebesar 169,1. Kecamatan Pare sebagai daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan memiliki jenis fasilitas terlengkap yaitu sebanyak 29 jenis dan nilai interaksi terkuat dengan Kecamatan Badas sebesar 227650778676 dan interaksi terlemah dengan Kecamatan Ringinrejo sebesar 3019277,838. Sementara Kecamatan Ngasem sebagai daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik memiliki jenis fasilitas sebanyak 27 jenis dan nilai interaksi terkuat dengan Kecamatan Pagu sebesar 162532615,6 dan interaksi terlemah dengan Kecamatan Kandangan sebesar 2508751,728. Melalui pemetaan dengan metode arcGIS menunjukkan bahwa nilai interaksi antarkecamatan sangat dipengaruhi oleh jarak, semakin dekat jarak antardaerah maka semakin besar pula interaksinya dan sebaliknya.

Kata kunci : pusat pertumbuhan, skalogram, indeks sentralitas, model gravitasi, arcGIS

*Determination of Growth Center and Public Services in Kediri Regency
(Geospatial Interaction Approach)*

Robby Pratama

*Department of Economics and Development Study, the Faculty of Economics and
Business, University of Jember*

ABSTRACT

This study aims to analyze how the distribution of public facilities in each district in Kediri Regency and how much the spatial interaction strengths between districts are determined as centers of growth with other districts in Kediri Regency, and mapping using arcGIS. The analytical tools used in this study are Scalogram Analysis, Centrality Index, Gravity Model, and ArcGIS Mapping Method. The results of the analysis showed that there are two districts which are the central areas of growth and public services, namely Pare District that has centrality index of 194,24 and Ngasem District with centrality index 169,1. Pare District as the central area of growth and services has 29 types of facilities and the strongest interaction value with Badas District is 227650778676 then the lowest interaction value with Ringinrejo District is 3019277,838. While the Ngasem District as the central area of growth and public services has 27 types of facilities and the strongest interaction with the Pagu District is 162532615,6 then the lowest interaction value with Kandangan District is 2508751,728. Through mapping with the arcGIS method, it shows that the interaction value between districts is strongly influenced by distance, the closer the distance between regions, the greater the interaction and in reverse.

Keywords : growth center, scalogram, centrality index, graviy model, arcGIS.

RINGKASAN

Penentuan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Pendekatan Interaksi Geospasial; Robby Pratama; 150810101048; 78 halaman; Jurusan Ekonomi Pembangunan Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan merupakan suatu proses yang umum terjadi terutama di Negara – Negara sedang berkembang. Pada umumnya semua Negara – Negara sedang berkembang memiliki permasalahan yang cukup rumit dalam pembangunan. Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah masalah kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan, pendidikan yang rendah, dan kepadatan penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan beberapa masalah di Negara berkembang melalui peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang.

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif, optimal dan berkelanjutan. Dimana tujuannya adalah untuk pemeratakan pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro menyebabkan terkonsentrasinya investasi dan sumber daya di perkotaan dan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan, sementara wilayah hinterland mengalami pengurusan sumber daya yang berlebihan

Dalam teori pusat pertumbuhan (*growth pole*) dinyatakan bahwa penentuan pusat pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan. Dampak yang terjadi dengan adanya pengembangan ekonomi melalui penentuan pusat pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah lain. Hal ini dikarenakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya spread effect

ke daerah sekitarnya sehingga daerah tersebut juga akan tumbuh dan berkembang perekonomiannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kekuatan sentralitas atas keberadaan sarana infrastruktur yang tersedia di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri, mengidentifikasi kekuatan interaksi ekonomi di antara kecamatan – kecamatan di Kabupaten Kediri, dan memetakan persebaran pelayanan publik dan infrastruktur di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis skalogram, indeks sentralitas, metode gravitasi, dan pemetaan GIS.

Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas yang telah dilakukan dengan menggunakan 29 jenis fasilitas yang ada menghasilkan 6 hierarki daerah berdasarkan ketersediaan jenis fasilitas di setiap kecamatan. Kecamatan Pare dan Kecamatan Ngasem yang merupakan daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik di Kabupaten Kediri. Kecamatan Pare menduduki hierarki I dengan jumlah 29 jenis fasilitas dan nilai sentralitas tertinggi yaitu sebesar 196,24. Kecamatan Ngasem menduduki hierarki II dengan jumlah 27 jenis fasilitas dan nilai sentralitas tertinggi kedua yaitu sebesar 169,1.

Hasil analisis gravitasi yang dilakukan menunjukkan Kecamatan Pare sebagai daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik memiliki interaksi terkuat dengan Kecamatan Badas yaitu sebesar 227650778676, Kecamatan Kepung sebesar 57891709,03, dan Kecamatan Plemahan sebesar 49432890,75. Kecamatan Ngasem sebagai daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik memiliki nilai interaksi terkuat dengan Kecamatan Pagu dengan nilai interaksi sebesar 162532615,6, Kecamatan Kayenkidul dengan nilai interaksi sebesar 83256860,83, dan Kecamatan Gurah dengan nilai interaksi sebesar 67504451,11.

Hasil pemetaan dengan menggunakan metode GIS dapat diketahui bahwa Kecamatan Pare dan Kecamatan Ngasem sebagai pusat pertumbuhan memiliki nilai interaksi paling kuat dengan kecamatan atau wilayah di sekitarnya yang mempunyai jarak terdekat. Semakin dekat jarak kedua wilayah maka semakin besar nilai interaksi yang dihasilkan oleh kedua wilayah tersebut. Sedangkan

kecamatan yang tidak berbatasan secara langsung atau jaraknya yang jauh menciptakan suatu nilai interaksi yang lemah.

Saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri diharapkan mampu membangun atau memperbaiki sarana fasilitas penunjang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kediri wilayah selatan karena daerah tersebut memiliki sarana fasilitas yang kurang mendukung dan jaraknya yang cukup jauh dari daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik yaitu Kecamatan Pare dan Kecamatan Ngasem. Hal ini bertujuan agar wilayah Kabupaten Kediri bagian selatan mempunyai daerah pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi ketimpangan lokal yang ada. Penentuan pusat pertumbuhan dan pelayanan publik diharapkan mampu mendukung proses percepatan pertumbuhan ekonomi melalui program pemerintah yang ada. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan sebagai pertimbangan untuk proses pembentukan RTRW Kabupaten Kediri di masa yang akan datang.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Penentuan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Pendekatan Interaksi Geospasial)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan banyak waktu luang untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan serta memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia memberikan banyak waktu luang untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan serta memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala waktu dan nasehatnya dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
6. Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

8. Ibunda Puji Kasiani, terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas doa, kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan atas semua pengorbanan dalam mendidik penulis baik moral maupun intelektual yang tidak ternilai dengan apapun;
9. Sahabat dan teman - temanku Intan Amelia, Leni Kurnia, Muslikhatus Sya'adah, Fuad Hadi, Bagus Pribadhi, Haluf Ika, Zulfi Laili, Khiyatul Masfufah, Niendya Okta, dan Anifatu Rohmah terima kasih telah membagi pengalaman hidup, menerima keluh kesah, menikmati canda tawa dan semua kenangan serta atas banyak waktu yang selalu kalian berikan, doa, dukungan yang memotivasi penulis;
10. Terima kasih untuk Mas Alfian Wiji yang telah membantu penulis;
11. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebersamaanya;
12. Seluruh teman-teman AIESEC in Unej yang telah memberikan saya pengalaman yang luar biasa selama saya bergabung;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 16 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	13
2.1.2 Teori Kutub Pertumbuhan.....	14
2.1.3 Teori Gravitasi Carey dan Ravenstein	15
2.1.4 Teori Lokasi August Losch.....	16
2.1.5 Teori Pusat Pinggiran Hirschman dan Myrdal.....	17

2.1.6 Teori Konsentrik Burges.....	19
2.1.7 Teori Tempat Sentral	20
2.1.8 Teori Pembangunan Ekonomi.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	31
2.4 Kerangka Konseptual.....	31
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.1.1 Jenis Penelitian	33
3.1.2 Unit Analisis	33
3.2 Metode Analisis Data.....	33
3.2.1 Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas.....	33
3.2.2 Analisis Gravitasi.....	35
3.2.3 Metode GIS.....	36
3.3 Definisi Operasional.....	37
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1 Kondisi dan Letak Geografis	39
4.1.2 Keadaan Penduduk	40
4.1.3 Kondisi Perekonomian.....	42
4.2 Hasil Analisis Data	44
4.2.1 Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas.....	44
4.2.2 Analisis Gravitasi.....	47
4.2.3 Metode GIS.....	51
4.3 Pembahasan.....	52
BAB 5 PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

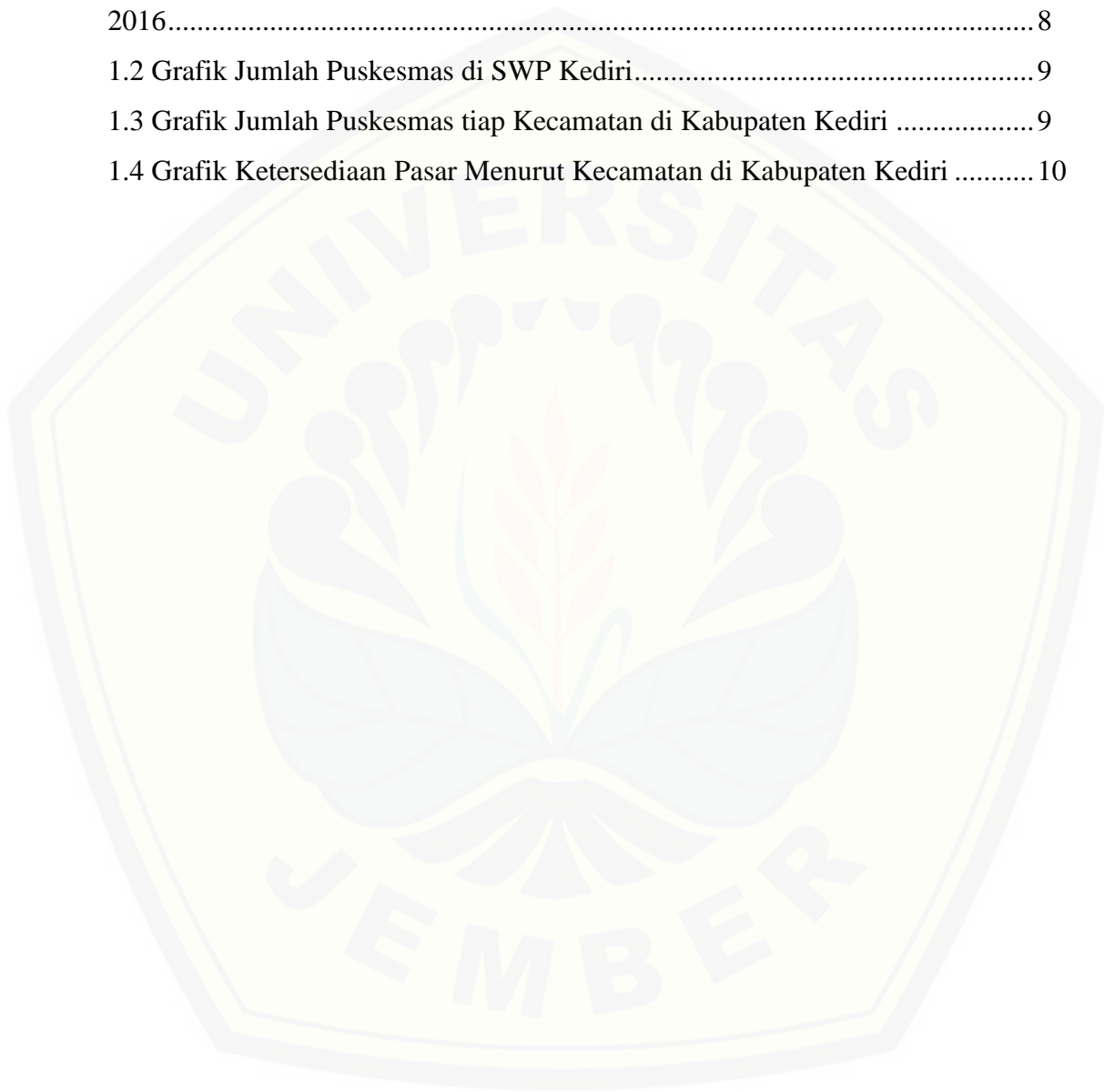
	Halaman
1.1 Tabel Presentase Distribusi PDRB Kabupaten Kediri atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2010 – 2016.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	25
2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	31
4.1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kediri.....	40
4.2 Data Jumlah Penduduk dan Kepadatan Peduduk per Kecamatan di Kabupaten Kediri tahun 2017.....	41
4.3 Presentase Distribusi PDRB Kabupaten Kediri atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2010 – 2016.....	42
4.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kediri 2011 – 2016.....	43
4.5 Hasil Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Kabupaten Kediri.....	44
4.6 Nilai Interaksi Kecamatan Pare sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan Lain	47
4.7 Nilai Interaksi Kecamatan Ngasem sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan Lain	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Model Zone Konsentris Burges	19
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Kediri.....	39
4.2 Peta Hierarki menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri.....	46
4.3 Peta Interaksi Kecamatan Pare sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik	48
4.4 Peta Interaksi Kecamatan Ngasem sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik	50
4.5 Peta Hierarki tiap Kecamatan dan Interaksi Daerah Pusat Pertumbuhan dengan Kecamatan Sekitar	51

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1.1 Presentase Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kediri Tahun 2011 – 2016.....	8
1.2 Grafik Jumlah Puskesmas di SWP Kediri.....	9
1.3 Grafik Jumlah Puskesmas tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri	9
1.4 Grafik Ketersediaan Pasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri	10



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabel Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kediri (Lapangan Usaha) (Persen) menurut Harga Konstan 2010.....	61
Lampiran 2. Tabel Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Kediri (Lapangan Usaha) (Persen) menurut Harga Konstan 2010.....	62
Lampiran 3. Tabel Jenis Fasilitas tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri	63
Lampiran 4. Tabel Bobot Jenis Fasilitas tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri ...	66
Lampiran 5. Tabel Perhitungan Indeks Sentralitas tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri berdasarkan Bobot Fasilitas	69
Lampiran 6. Tabel Nilai Indeks Sentralitas dan Hierarki tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri	72
Lampiran 7. Tabel Nilai Interaksi Kecamatan Pare sebagai Daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan Lain.....	73
Lampiran 8. Tabel Nilai Interaksi Kecamatan Ngasem sebagai Daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan Lain.....	74
Lampiran 9. Peta Hierarki tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri	75
Lampiran 10. Peta Interaksi Kecamatan Pare sebagai daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan lain.....	76
Lampiran 11. Peta Interaksi Kecamatan Ngasem sebagai daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan lain	77
Lampiran 12. Peta Hierarki tiap Kecamatan dan Interaksi Daerah Pusat Pertumbuhan dengan Kecamatan Sekitar.....	78

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang umum terjadi terutama di negara – negara sedang berkembang. Pada umumnya semua Negara – Negara sedang berkembang memiliki permasalahan yang cukup rumit dalam pembangunan. Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah masalah kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan, pendidikan yang rendah, dan kepadatan penduduk. (Todaro, 2006). Selaras dengan penelitian Nainggolan (2015) yang menyatakan bahwa dalam solusi penyelesaiannya, pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan beberapa masalah di Negara berkembang melalui peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang

Pembangunan ekonomi pada suatu negara adalah suatu proses guna meningkatkan pendapatan nasional (total) dan pendapatan perkapita masyarakat dengan mempertimbangkan aspek adanya pertumbuhan penduduk. Dengan pertimbangan adanya pertumbuhan penduduk menuntut pemerintah atau para pembuat kebijakan pembangunan untuk menggerakkan seluruh sector perekonomian daerah secara maksimal (Emalia & Farida, 2018). Penggerakan sector perekonomian yang maksimal dan efisien akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat serta membantu peningkatan output total atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB sangat penting manfaatnya untuk menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan PDRB mencakup banyak indikator ekonomi yang termasuk dalam perhitungan guna mengetahui pertumbuhan ekonomi wilayah secara nyata. (Tarigan, 2010).

Sjafrizal (2008) menyatakan bahwa pendapatan per kapita hingga saat ini masih digunakan untuk dua tujuan berikut : (1) digunakan sebagai tolak ukur percepatan pembangunan ekonomi suatu Negara pada tahun tertentu, dan (2) digunakan sebagai suatu pembanding tingkat kemakmuran suatu Negara. Namun terdapat beberapa kelemahan pada penggunaan variable pendapatan per kapita sebagai indicator pembangunan ekonomi, yakni tidak sesuai penggunaan pendapatan per kapita untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan ekonomi dan kurangnya data statistic dan metologi penelitian perhitungan pendapan per kapita.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah melalui wewenang dari pemerintah pusat mempunyai hak yang lebih besar untuk membangun rangkaian proses, mekanisme dan perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Dengan adanya undang – undang ini maka membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam pembangunan daerah terutama pembangunan ekonomi daerah. Selaras dengan penjelasan oleh Arsyad (1999) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengolah dan mengelola sumber daya yang ada di daerah serta membentuk suatu kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna menciptakan suatu lapangan kerja yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Otonomi daerah khususnya di kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dampak positif karena daerah otonom dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimilikinya guna mensejahterakan masyarakatnya. Guna menuju kemandirian, sudah saatnya daerah otonom harus menggali semua potensi yang dimilikinya. Pada tahap awal, pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi (Mehrtens & Abdurahman, 2007).

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber

daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif, optimal dan berkelanjutan. Dimana tujuannya adalah untuk pemeratakan pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah (Rahayu & Santoso, 2014). Namun, menurut penelitian Priyadi & Atmadji (2017) yang menyatakan bahwa kesenjangan wilayah ini merupakan fenomena universal. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro menyebabkan terkonsentrasinya investasi dan sumber daya di perkotaan dan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan, sementara wilayah hinterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan.

Perroux dalam Tarigan (2004) menyatakan mengenai teori pusat pertumbuhan (*growth pole*) bahwa penentuan pusat pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan. Dampak yang terjadi dengan adanya pengembangan ekonomi melalui penentuan pusat pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah lain. Hal ini dikarenakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya *spread effect* ke daerah sekitarnya sehingga daerah tersebut juga akan tumbuh dan berkembang perekonomiannya.

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan sebagai lokasi pusat di suatu daerah yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menstimulasi kehidupan ekonomi daerah lain, baik ke dalam maupun ke luar (Perroux, 1955). Lokasi pusat yang dimaksud secara geografis yakni mempunyai kemudahan dalam hal kesempatan dan penghematan untuk menjangkanya. Hirschman (1950) menyatakan mengenai penyebab terjadinya pusat atau kutub pertumbuhan yaitu karena adanya kesempatan investasi yang besar, kemudahan mencari tenaga kerja yang terampil, lapangan pekerjaan yang luas, dan ketersediaan transportasi yang mudah dijangkau di daerah tersebut. Hal ini lah yang membuat daerah tersebut menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) sehingga menyebabkan terjadinya berbagai jenis aktivitas ekonomi.

Albert O. Hirschman (1950) mempunyai pendapat lain yang menyatakan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada daerah – daerah belakangnya melalui efek polarisasi (*polarization effect*) dan efek kebawah

(trickling down effect). Polarisasi efek tersebut disebabkan dengan adanya pemusatan investasi pada pusat pertumbuhan, sedangkan *trickling down effect* dapat berkembang dengan cara meningkatkan daya tarik wilayah – wilayah disekitarnya. Penentuan pusat atau kutub pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan karena setiap daerah mempunyai kemampuan dan perbedaan struktur perekonomian. Oleh karena itu, penentuan pusat dan kutub pertumbuhan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar menghasilkan *spread effect* ke daerah belakangnya, sehingga mempercepat proses pembangunan ekonomi daerah.

Penjelasan dalam buku (Khosim, 2006 : 104) mengenai pengaruh atau peran akan adanya pemusatan pertumbuhan, antara lain yang pertama pemusatan dan persebaran sumber daya alam, yang akan mempengaruhi terhadap daerah pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia, daerah pusat pertumbuhan akan berguna untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya yang ada di daerah, wilayah pusat pertumbuhan akan berfungsi untuk mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar di sekitarnya, dan daerah pusat pertumbuhan akan berfungsi sebagai inti pengembangan sumber daya yang ada di daerah sekitarnya. Peran yang kedua adalah perkembangan ekonomi dari daerah pusat pertumbuhan akan menjadi daerah perkembangan ekonomi di wilayah sekitarnya, lalu daerah pusat pertumbuhan akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di daerah sekitar, kemudian daerah pusat pertumbuhan akan memunculkan berbagai fasilitas ekonomi, seperti pabrik, bank, bursa saham, dan gudang, dan daerah pusat pertumbuhan akan memunculkan berbagai lapangan pekerjaan di wilayah sekitarnya. Peran yang ketiga adalah mengenai perubahan sosial budaya masyarakat, yang akan mempengaruhi terhadap hal terjadinya akulturasi dan asimilasi atau tercampurnya berbagai budaya dalam masyarakat, lalu menyebabkan pergeseran nilai masyarakat dan paguyuban menjadi patembayan, dan menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat secara pesat.

Penentuan wilayah sebagai pusat pertumbuhan akan menjelaskan keadaan suatu wilayah dengan sudut pandang ekonomi regional. Dengan ditentukannya pusat pertumbuhan pula, pemerintah dapat mempermudah kebijakan yang akan

diambil dalam penetapan wilayah pembangunan (Gultom, 2014). Pengembangan ekonomi wilayah juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penentuan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penetapan pusat pertumbuhan ekonomi dapat mempermudah pemerintah dalam membangun perekonomian dan mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah tersebut.

Peran dari adanya penentuan pusat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah yaitu diharapkan berperan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi wilayah tidak hanya berfokus pada pembangunan dari segi ekonomi saja, namun juga harus memperhatikan aspek – aspek penunjang lainnya. Aspek – aspek penunjang lainnya yaitu pembangunan di suatu wilayah juga harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Apabila semua aspek tersebut dilaksanakan, maka proses pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah akan lebih mudah tercapai. (Imelda, 2013).

Kemajuan perekonomian suatu region/wilayah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fase, diantara lain : fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik, fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau *polarized region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan, dan fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi (Glasson, 1974).

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kondisi perekonomian di Kabupaten Kediri hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini pada tahun 2016 menyumbang hingga 23,7% terhadap total PDRB Kabupaten Kediri.

Tabel 1.1 Presentase Distribusi PDRB Kabupaten Kediri atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2010 – 2016 :

Kategori	Sektor PDRB	Presentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen) Harga Konstan 2010						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.71	26.39	26.05	25.18	24.62	24.17	23.7
B	Pertambangan dan Penggalian	1.82	1.83	1.75	1.68	1.63	1.59	1.55
C	Industri Pengolahan	19.66	19.57	19.27	19.04	19.19	19.42	19.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
F	Konstruksi	9.19	9.26	9.37	9.58	9.64	9.46	9.44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.18	19.43	19.79	20.35	20.42	20.45	20.59
H	Transportasi dan Pergudangan	1.64	1.68	1.71	1.77	1.85	1.88	1.91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.23	1.25	1.25	1.26	1.28	1.31	1.33
J	Informasi dan Komunikasi	4.77	4.9	5.12	5.41	5.68	6.02	6.16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.62	1.65	1.71	1.79	1.81	1.81	1.82
L	Real Estate	1.96	2.01	2.02	2.05	2.07	2.08	2.08
M,N	Jasa Perusahaan	0.29	0.29	0.29	0.3	0.3	0.3	0.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.34	4.24	4.13	4	3.82	3.79	3.77
P	Jasa Pendidikan	4.86	4.73	4.77	4.79	4.83	4.89	4.93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.71	0.76	0.79	0.8	0.83	0.82	0.82
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.87	1.87	1.86	1.88	1.9	1.9	1.91
PDRB		100	100	100	100	100	100	100
PDRB Tanpa Migas		99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99

Sumber : BPS Kabupaten Kediri 2018

Pertanian masih sangat mendominasi karena memang topografi di Kabupaten Kediri yang mendukung. Data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Kediri dikuasai oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran,

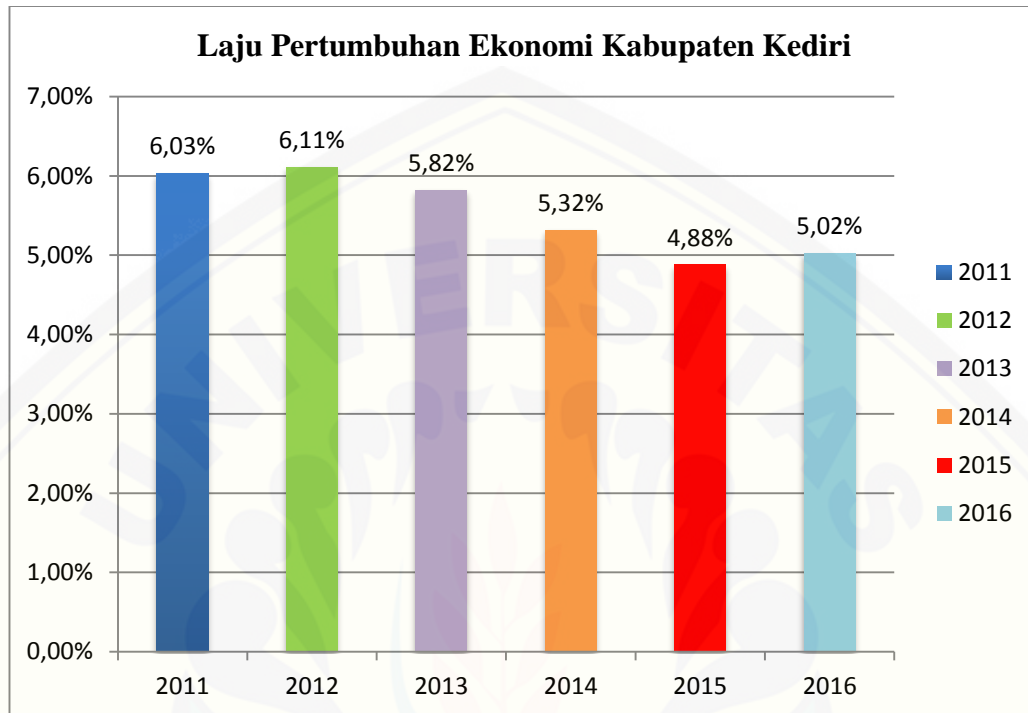
sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi. Sektor pertanian setiap tahun mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PRRB. Sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi saat ini menjadi fokus utama Kabupaten Kediri dalam perekonomiannya. Ketiga sektor ini tentu menciptakan suatu struktur perekonomian baru dan berpengaruh terhadap kondisi masyarakat sekitar. Perubahan PDRB di Kabupaten dari tahun 2010 – 2016 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Berdasarkan data di atas bahwa kontribusi PDRB terbesar pada tahun 2010 disumbang oleh empat sektor utama yaitu (1) sektor pertanian (26,71%), (2) sektor industri pengolahan (19,66%), (3) sektor perdagangan besar dan eceran (19,18%), dan (4) sektor konstruksi (9,19%). Selama enam tahun, kondisi ranking distribusi PDRB tidak berubah pada tahun 2016 namun ada beberapa sektor yang mengalami penurunan presentase distribusi PDRBnya yaitu sektor pertanian turun menjadi (23,7%), sektor industri pengolahan turun menjadi (19,57%), sektor industri perdagangan besar dan eceran naik menjadi (20,59%), dan sektor konstruksi naik menjadi (9,44%).

Perubahan presentase distribusi PDRB di Kabupaten Kediri tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sektor perdagangan setiap tahunnya mengalami trend positif. Hal ini tentunya menjadi indikator bahwa perekonomian di Kabupaten Kediri mulai berkembang terutama dari sektor perdagangan. Proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan menjadi lebih efisien apabila kegiatan perekonomian ini bisa terjadi di seluruh kawasan di Kabupaten Kediri.

Gambar 1 menunjukkan presentase laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi. Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri sebesar 6,03% dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 6,11 %. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami penurunan yaitu pada angka 5,82 % dan terus menurun hingga tahun 2015. Pada tahun 2014 turun menjadi 5,32 % dan tahun 2015 menjadi 4,88%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 5,02 %.

Penjelasan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri akan dijelaskan pada grafik 1.1 berikut :



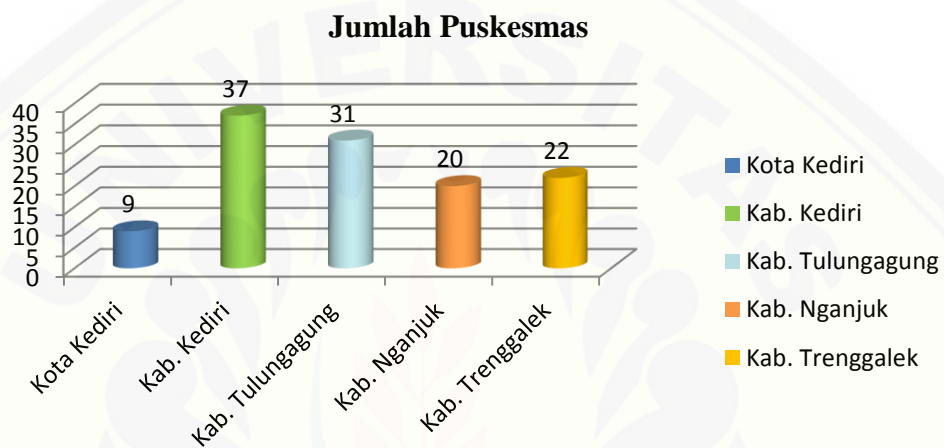
Grafik 1.1 Presentase Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kediri Tahun 2011 – 2016

Sumber : BPS Kabupaten Kediri 2018 (data diolah)

Salah satu kebijakan yang dapat diambil untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan ketimpangan dan persebaran dari sektor perekonomian dan infrastruktur yang tidak merata tersebut yaitu dengan menentukan pusat pertumbuhan (*growth center*). Penentuan pusat pertumbuhan dan pelayanan ini berguna untuk mempermudah pemerintah daerah untuk menentukan wilayah (Kecamatan) mana di Kabupaten Kediri yang cocok untuk dijadikan pusat perekonomian dan pelayanan publik yang diharapkan mempunyai dampak *trickling down effect* dan *spread effect* sehingga kegiatan pusat pertumbuhan berdampak pada daerah sekitarnya juga akan dapat tumbuh (Harahap : 2009).

Unit puskesmas juga merupakan salah satu pertimbangan dalam penentuan pusat pertumbuhan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan keberadaan

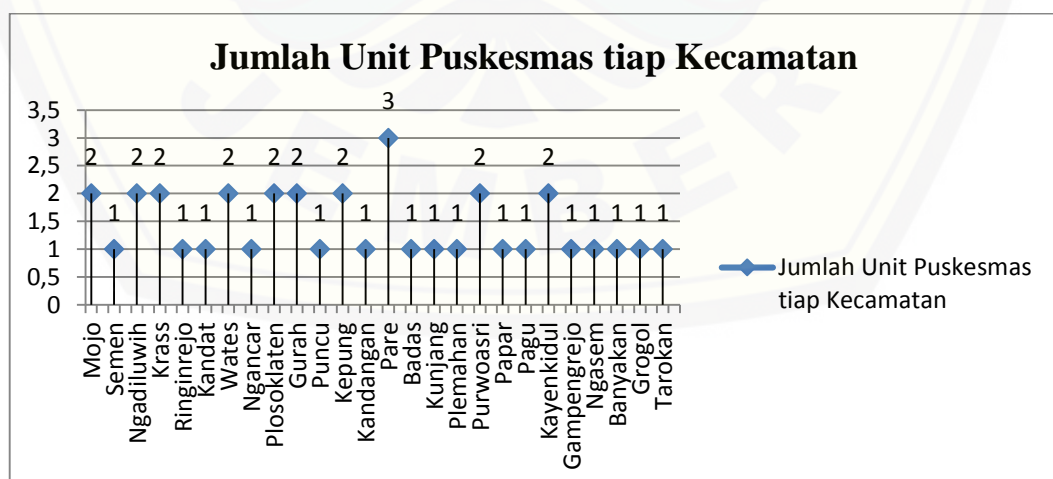
puskesmas sangat penting jumlahnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin banyak fasilitas publik yang tersedia di suatu wilayah, maka kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri mempunyai pelayanan publik berupa puskesmas paling banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di SWP Kediri. Penjelasan jumlah unit puskesmas tiap kabupaten di SWP Kediri akan dijelaskan pada grafik 1.2 berikut :



Grafik 1.2. Grafik Jumlah Puskesmas di SWP Kediri

Sumber : BPS Kabupaten Kediri 2018 (data diolah)

Jumlah puskesmas tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri dapat dilihat pada grafik 1.3 berikut :

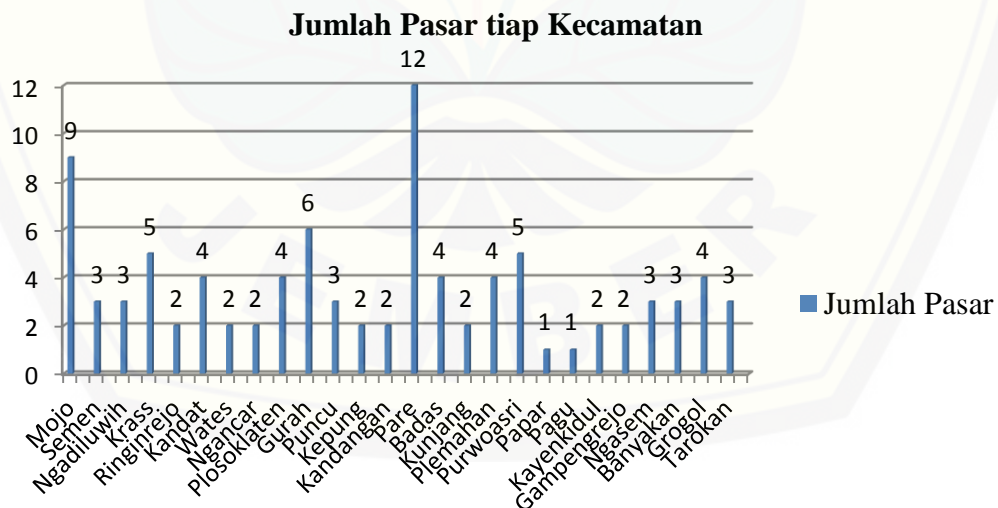


Grafik 1.3. Grafik Jumlah Puskesmas tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri

Sumber : BPS Kabupaten Kediri 2018 (data diolah)

Gambar 3 menunjukkan bagaimana persebaran unit puskesmas di Kabupaten Kediri menurut kecamatan sebagai salah satu fasilitas publik guna menunjang kualitas kesehatan sumber daya manusia. Setiap kecamatan di Kabupaten Kediri sudah memiliki setidaknya 1 puskesmas induk sebagai fasilitas penunjang kesehatan masyarakat. Kecamatan Pare memiliki jumlah unit puskesmas paling banya yaitu 3 unit puskesmas. Hal ini masih menjadi indikator bahwa Kecamatan Pare merupakan salah satu kecamatan yang maju di Kabupaten Kediri.

Gambar 4 menunjukan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Kediri telah mempunyai salah satu fasilitas publik berupa pasar guna menunjang aktivitas ekonomi wilayah. Persebaran jumlah pasar di setiap Kecamatan juga terlihat bahwa Kecamatan Pare yang mempunyai mempunyai fasilitas penunjang ekonomi yang paling banyak yaitu 12 pasar. Hal ini tentunya merupakan salah satu indikator bahwa Kecamatan Pare diduga merupakan salah satu kecamatan yang cukup maju di Kabupaten Kediri. Sedangkan Kecamatan Papar dan Kecamatan Pagu mempunyai jumlah pasar paling sedikit yaitu masing – masing 1 pasar. Penjelasan ketersediaan pasar di tiap kecamatan di Kabupaten Kediri dapata dilihat pada grafik 1.4 berikut :



Grafik 1.4. Grafik Ketersediaan Pasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri
 Sumber : BPS Kabupaten Kediri 2018 (data diolah)

Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dimulai dari beberapa sektor yang dinamis dan mampu memberikan *output ratio* yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas (Sukesi, 2010:34). Keberadaan suatu fasilitas penunjang perekonomian seperti pasar akan menjamin *ekuilibrium* (keseimbangan) dalam distribusi spasial ekonomi dan proses *trickle down effect* atau *centre down* dengan sendirinya. Hal ini akan terjadi ketika kesejahteraan di pusat wilayah perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan *hinterland* dan perdesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki pusat wilayah (perkotaan) dan daerah – daerah sekitarnya (Sukesi, 2010:36).

Kondisi di atas menarik perhatian peneliti untuk memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kediri yang berjudul **“Penentuan Pusat Pertumbuhan Dan Pelayanan Publik Di Kabupaten Kediri”**. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kekuatan (sentralitas) suatu kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan persebaran pelayanan publik bagi masyarakat, serta kekuatan interaksi antar kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri untuk melihat seberapa besar hubungan (interaksi spasial) antar kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Penentuan pusat pertumbuhan adalah salah satu cara yang digunakan untuk menstimulasi atau menggerakkan pembangunan dan perkembangan suatu wilayah. Pusat pertumbuhan dijadikan sebagai suatu strategi bagi pemerintah daerah untuk menentukan dimana nantinya sebuah kegiatan aktivitas ekonomi atau yang lainnya dipusatkan. Hal ini dikarenakan pusat pertumbuhan mempunyai dampak (*spread effect*) bagi daerah di sekitarnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dirumuskanlah beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar kekuatan sentralitas atas keberadaan sarana infrastruktur pelayanan publik yang tersedia di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana kekuatan interaksi di antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan – kecamatan lain di Kabupaten Kediri ?

3. Bagaimana pemetaan tingkat persebaran pelayanan publik / infrastruktur di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan sentralitas atas keberadaan sarana infrastruktur yang tersedia di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan interaksi ekonomi di antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan – kecamatan lain di Kabupaten Kediri
3. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persebaran pelayanan publik dan infrastruktur di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi terutama universitas dalam hal studi analisis pemusatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam menambah kajian dan referensi mengenai analisis penentuan pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan di Kabupaten Kediri.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan ekonomi suatu wilayah pada tahun tertentu dengan tahun – tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan atau menggambarkan tentang kenaikan hasil produksi riil dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara belum bisa dijadikan acuan pasti terhadap kemajuan atau kemakmuran masyarakatnya melalui pendapatan. Hal ini disebabkan karena terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki nilai yang lebih rendah di bawah tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita masyarakat akan rendah. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut stagnan atau tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat, serta tidak mengalami kemajuan (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2004).

Hirschman (1950) mengemukakan konsep pengembangan wilayah yaitu dalam suatu wilayah atau daerah yang cukup luas hanya terdapat beberapa titik pertumbuhan (*growth center*), dimana industri berada pada suatu kelompok daerah tertentu sehingga menyebabkan timbulnya daerah pusat dan daerah belakang (*hinterland*). Untuk mengurangi ketimpangan ini perlu memperbanyak titik-titik pertumbuhan baru.

2.1.2 Teori Kutub Pertumbuhan

Perroux (1955) mendefinisikan bahwa teori kutub pertumbuhan atau *Growth Poles Theory* adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruhan pelosok daerah. Selain itu teori ini juga menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu.

Perroux (1955) juga menyatakan bahwa suatu pusat pengembangan didefinisikan sebagai suatu konsentrasi industri pada suatu tempat tertentu yang kesemuanya saling berkaitan melalui hubungan antara input dan output dengan industri utama (*propulsive industry*). Konsentrasi dan saling berkaitan merupakan dua faktor penting pada setiap pusat pengembangan karena melalui faktor ini akan dapat diciptakan berbagai bentuk aglomerasi yang dapat menunjang pertumbuhan industri-industri yang bersangkutan melalui pengefisienan biaya produksi (Sirojuzilam, 2008). Pusat pertumbuhan dapat diartikan ke dalam dua cara yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (*spread effect*). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2004). Secara singkat bahwa hasil dari penentuan kutub pertumbuhan adalah memicu adanya proses regionalisasi dan munculnya pusat-pusat ekonomi regional yang berupa pusat, *semi-periphery* dan *periphery* yang kemudian tidak hanya menjadi hanya jantung pengembangan wilayah, tetapi juga menjadi jembatan untuk menuju globalisasi (John B. Parr, 1999, John B. Parr, 1973, Morgan D. Thomas, 1975. dalam *The Role of the Concept of Growth Poles for Regional Development*)

Menurut Arsyad (1999: 148) inti dari teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux ini adalah:

1. Dalam proses pembangunan akan muncul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah, karena keterkaitan antara industri. Dengan demikian diharapkan pengembangan terhadap industri unggulan akan mempengaruhi industri lainnya yang berhubungan erat dengan industri unggulan.
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.
3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem yang relatif aktif dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang bergantung pada industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif atau daerah pendukung.

2.1.3 Teori Gravitasi Carey dan Ravenstein

Model ini berdasarkan kajian dari Ravenstein (1885) yang menyatakan bahwa volume migrasi bergantung pada jarak. Migrasi cenderung menempuh jarak dekat dan untuk migrasi jarak jauh pada umumnya menuju pusat-pusat ekonomi penting. Ravenstein juga menyatakan bahwa keberadaan transportasi, kawasan industri, dan perdagangan menyebabkan frekuensi migrasi meningkat dan pengambilan keputusan migrasi terutama didorong oleh motif ekonomi. Perhitungan migrasi penduduk menggunakan model gravitasi digunakan untuk menghitung penyerapan migran di daerah tujuan yang dikaitkan dengan faktor jarak antara daerah pengirim dan penerima migran. Seperti yang dikemukakan dalam Hukum Ravenstein, migrasi cenderung menempuh jarak terdekat dan menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Faktor jarak menurut Ravenstein merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan migrasi penduduk. Kemudian hal ini juga didukung oleh faktor pendorong dan penarik migrasi yang diungkapkan oleh Lee (1966) bahwa volume migrasi dipengaruhi oleh kondisi

daerah asal dan tujuan. Dalam hal ini, daerah asal dapat berbentuk faktor yang mendorong migrasi atau menahan untuk tidak pindah. Sementara itu, daerah tujuan merupakan faktor yang menyebabkan orang tertarik untuk datang. Salah satu faktor pendorong dan penarik dalam migrasi adalah faktor ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Seseorang dianggap akan berpindah ke daerah yang memiliki faktor penarik lebih tinggi. Karakteristik dan fungsi lain dari teori model Gravitasi antara lain :

1. Setiap lokasi mempunyai daya tarik tertentu tergantung pada potensi yang terdapat pada suatu lokasi.
2. Adanya daya tarik mendorong berbagai kegiatan lain untuk berlokasi di dekat kegiatan yang telah ada terlebih dahulu
3. Model gravitasi digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut
4. Daya tarik suatu lokasi (kota atau wilayah) dapat diukur dari jumlah penduduk, lapangan kerja, total pendapatan, fasilitas pelayanan publik, dan sebagainya.

2.1.4 Teori Lokasi August Losch

Teori lokasi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain (*activity*). Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: bahan baku lokal (*local input*); permintaan lokal (*local demand*); bahan baku yang dapat dipindahkan (*transferred input*); dan permintaan luar (*outside demand*) (Hoover & Giarratani, 2007).

August Losch menulis sebuah teori lokasi didalam bukunya yang berjudul *Economics of Location* pada tahun 1954. Teori Losch mengungkapkan teorinya berdasarkan kemampuan sebuah produksi untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Maksudnya, semakin jauh dari pasar maka konsumen menjadi enggan membeli karena mahalnya biaya transportasi menuju tempat penjualan yang jauh.

Sehingga produsen harus memilih lokasi industri yang mempunyai tempat yang cukup dekat dengan konsumen agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

Dalam teorinya, Losch lebih menyarankan agar lokasi industri terletak di pasar atau mendekati pasar. Ini mempunyai tujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga dapat ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Menurut pendapat Losch, dalam lokasi industri yang tampak tidak teratur dapat ditemukan pola keberaturan. Oleh karena itu Losch merupakan pendahulu dalam mengatur kegiatan ekonomu secara spasial dan merupakan pelopor dalam teori ekonomi regional modern. Teori Losch berasumsi bahwa suatu daerah yang homogen yang mempunyai distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata serta selera konsumen yang sama. Contoh kegiatan tersebut merupakan pertanian yang mempunyai skala kecil yang pada dasarnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing petani. Akan timbul perdagangan baru apabila terdapat kelebihan produksi.

2.1.5 Teori Pusat Pinggiran Hirschman dan Myrdal

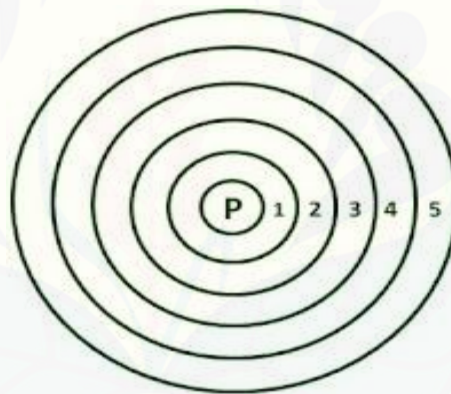
Hirschman (1958) menyatakan bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya. Ia menggunakan istilah Titik Pertumbuhan (Growing Point) atau Pusat Pertumbuhan (Growing Centre). Di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industri berkelompok ditempat itu, karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat- pusat pertumbuhan dari pada daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorsikan tenaga kerja yang trampil dan pihak lain akan mengurangi pengangguran tidak kentara di daerah belakang. Hal ini tergantung pada tingkat koplementaritas antara dua tempat tersebut. Jika koplementaritas kuat akan

terjadi proses penyebaran pembangunan ke daerah-daerah belakang (*trikling down*) dan sebaliknya jika komplementaritas lemah akan terjadi pengaruh polarisasi (Keban, 1995). Hirschman optimis dan percaya bahwa pengaruh *trikling-down* akan mengatasi pengaruh polarisasi. Misalnya bila daerah perkotaan berspesialisasi pada industri dan daerah perdesaan berspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus mendorong perkembangan daerah perdesaan, tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pada khususnya ada kemungkinan besar bahwa elastisitas penawaran jangka pendek di daerah perdesaan adalah sedemikian rendah sehingga dasar pertukaran akan berubah merugikan daerah perkotaan. Dalam jangka panjang penghematan-penghematan ekstrnal dan tersedianya komplementaritas di pusat-pusat akan menjamin penyebaran pembangunan ke daerah-daerah disekitarnya.

Myrdal (1957) menggunakan istilah *backwash effect* dan *spread effect* yang artinya persis serupa dengan polarisasi dan pengaruh *trikling down*. Analisa Myrdal memberikan kesan pesimistis, ia berpendapat bahwa polarisasi muncul lebih kuat dari pada penyebaran pembangunan, permintaan faktor-faktor produksi akan menumpuk di daerah- daerah perkotaan yang memberikan manfaat kepadanya, dan sebaliknya di daerah perdesaan yang tidak menguntungkan akan menipis. Hirschman menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif, sedangkan Myrdal menekankan pada langkah-langkah kebijaksanaan untuk melemahkan *backwash effect* dan memperkuat *spread effect* agar proses kausasi sirkuler kumulatif mengarah keatas, dengan demikian semakin memperkecil ketimpangan regional (Murতোমো (1988), Indra Catri (1993), Keban, (1995)). Myrdal mengemukakan bahwa setelah pertumbuhan dimulai pada lokasi yang dipilih pada perekonomian bebas, arus masuk tenaga kerja, ketrampilan, modal dan komoditi berkembang secara spontan untuk mendukungnya. Tetapi arus ini meliputi efek *backwash*, ketidak samaan antara daerah-daerah yang berkembang dengan daerah-daerah lain.

2.1.6 Teori Konsentrik Burges

E.W. Burgess (1925), merupakan orang yang pertama kali menuangkan pengamatannya ini. Burgess menganggap bahwa kota sebagai suatu obyek studi dimana di dalamnya terdapat masyarakat manusia yang sangat kompleks, telah mengalami proses interrelasi antarmanusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Burgess menyatakan bahwa kota Chicago ternyata telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris dimana masing-masing jenis penggunaan lahan ini dianalogikan sebagai suatu konsep “*natural area*”. Dari pengamatannya, suatu kota akan terdiri dari zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona ini sekaligus mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Dari hal ini, kemudian menyebabkan Burgess terkenal dengan teori konsentrisnya (*Concentric Theory*).



Gambar 2.1 Model Zone Konsentris Burges

Ernes W. Burgess mengemukakan teori memusat atau konsentris yang menyatakan bahwa daerah perkotaan dapat dibagi dalam enam zona

1. Zona pusat daerah kegiatan (Central Business District), yang merupakan pusat pertokoan besar, gedung perkantoran yang bertingkat, bank, museum, hotel restoran dan sebagainya.
2. Zona peralihan atau zona transisi, merupakan daerah kegiatan. Penduduk zona ini tidak stabil, baik dilihat dari tempat tinggal maupun sosial ekonomi. Daerah ini sering ditemui kawasan permukiman kumuh yang disebut slum karena zona ini dihuni penduduk miskin. Namun demikian sebenarnya zona

ini merupakan zona pengembangan industri sekaligus menghubungkan antara pusat kota dengan daerah di luarnya.

3. Zona permukiman kelas proletar, perumahannya sedikit lebih baik karena dihuni oleh para pekerja yang berpenghasilan kecil atau buruh dan karyawan kelas bawah, ditandai oleh adanya rumah-rumah kecil yang kurang menarik dan rumah-rumah susun sederhana yang dihuni oleh keluarga besar. Burgess menamakan daerah ini *workingmen's homes*.
4. Zona permukiman kelas menengah (*residential zone*), merupakan kompleks perumahan para karyawan kelas menengah yang memiliki keahlian tertentu. Rumah-rumahnya lebih baik dibandingkan kelas proletar.
5. Wilayah tempat tinggal masyarakat berpenghasilan tinggi. Ditandai dengan adanya kawasan elit, perumahan dan halaman yang luas. Sebagian penduduk merupakan kaum eksekutif, pengusaha besar, dan pejabat tinggi.
6. Zona penglaju (*commuters*), merupakan daerah yang memasuki daerah belakang (*hinterland*) atau merupakan batas desa-kota. Penduduknya bekerja di kota dan tinggal di pinggiran.

2.1.7 Teori Tempat Sentral

Walter Christaller (1933) menyatakan bahwa teori tempat sentar merupakan suatu teori yang didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang terkadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Cara yang tepat untuk membentuk dan menyediakan suatu pelayanan berdasarkan aspek keruangan atau kewilayahan yaitu dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal (pusat). Lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkannya (A. Losch, 1945). Tempat-tempat tersebut diasumsikan sebagai titik kumpul yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya.

Teori Tempat Sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat dimana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral memperlihatkan bagaimana pola-pola lahan dari industri yang berbeda-beda terpadu membentuk suatu sistem regional kota-kota (Soepono, 2000:415).

Walter Christaller juga mengemukakan suatu konsep dasar dari teori tempat sentral yang diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Population threshold

yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk melancarkan dan kesinambungan dari unit pelayanan.

b. Range (jangkauan)

yaitu jarak maksimum yang perlu ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dari tempat pusat. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Range selalu lebih besar dibanding daerah tempat population threshold.
2. Inner limit (batas dalam) adalah batas wilayah yang didiami population threshold.
3. Outer limit (batas luar) adalah batas wilayah yang mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga di luar batas itu penduduk akan mencari atau pergi ke pusat lain.

2.1.8 Teori Pembangunan Ekonomi

Adam Smith (1790) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Melalui pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk haruslah seimbang lajunya. Apabila pertumbuhan penduduk diimbangi dengan kemajuan teknologi yang pesat maka akan dapat menghasilkan suatu spesialisasi dalam perekonomian. Namun, David Ricardo dan Malthus berpendapat sebaliknya bahwa semakin banyaknya pertumbuhan

penduduk akan menyebabkan turunnya tingkat pembangunan (Sukirno, 2006 : 245).

Bannock (2004) disisi lain menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat yang meningkat dalam jangka panjang, dengan disertai adanya perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perkembangan dalam hal teknologi, pola 22elat masyarakat maupun kelembagaan. Berdasarkan penjelasan tersebut pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat penting diantaranya adalah :

1. Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, artinya pembangunan ekonomi merupakan suatu tahap yang akan selalu terjadi di setiap bangsa dan masyarakat. Hal ini berlangsung secara terus menerus (*continuitas*).

2. Pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Pembangunan merupakan suatu usaha aktif yang dilakukan oleh semua elemen dalam suatu Negara untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu cerminan dalam penigkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang.

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan secara terus-menerus, tetapi pada suatu waktu tertentu dapat turun, namun turunnya tidak terlalu besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2015) berjudul “Analisis Penentuan Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun”. Penelitian ini menggunakan alat analisis skalogram, indeks sentralitas, dan model gravitasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 5 kecamatan yang

ditetapkan sebagai kecamatan pusat pertumbuhan yaitu : Kecamatan Siantar, Bandar, Tanah Jawa, Raya dan Bosar Maligas. Berdasarkan hasil analisis gravitasi menunjukkan bahwa kecamatan Siantar memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Bandar dengan Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Tanah Jawa dengan Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Panei, dan Kecamatan Bosar Maligas dengan Kecamatan Bandar.

Penelitian yang dilakukan oleh Emalia dan Farida (2018) berjudul “Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung”. Penelitian ini menggunakan alat analisis skalogram, metode gravitasi, dan arcGIS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Lampung Tengah memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto dan Sukesri berjudul “Penelitian Pengembangan Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau”. Penelitian ini menggunakan alat analisis skalogram dan indeks sentralitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 kecamatan yang potensial dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang, Kecamatan Belantikan Raya, dan Kecamatan Sematu Jaya.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah oleh Priyadi dan Atmaji (2017) yang berjudul “Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan alat analisis skalogram, indeks sentralitas, metode gravitasi dan analisis konsentrasi geografis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga kabupaten / kota yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota

Yogyakarta, dengan hinterland dari Kabupaten Bantul adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Imelda (2013) yang berjudul “Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Daerah Hinterland Kota Palembang”. Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis skalogram dan indeks sentralitas. Hasil dari penelitian ini adalah pusat pertumbuhan primer di Kota Palembang adalah Kecamatan Ilir Timur I dan II, Sekunder adalah Kecamatan Ilir Barat 1 dan II, Sukarami, Kalidoni, dan Seberang Ulu 2, dan Sako.

Lalu penelitian terdahulu selanjutnya adalah oleh Halima Tussa'diah yang berjudul “Analisis Skalogram Guttman Kabupaten Blora”. Penelitian ini menggunakan alat analisis skalogram, indeks sentralitas, dan model gravitasi, serta GIS. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua kecamatan yang masuk ke dalam orde I atau dengan kata lain memiliki jumlah fasilitas terlengkap yaitu Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Setiawan (2014) yang berjudul “Pelayanan Kecamatan Dan Interaksi Antar Kecamatan Pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Di Kabupaten Tegal”. Penelitian ini menggunakan alat analisis skalogram, indeks sentralitas, metode *overlay*, dan metode gravitasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Adiwerna. Lalu, tingkat interaksi menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah tingkat interaksi tertinggi adalah Kecamatan Margasari dengan jumlah interaksi tertinggi di 8 Kecamatan.

Tabel di bawah merupakan penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, berikut adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1	Pandapotan T.P Nainggolan 2015	Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun	1. Analisis Skalogram 2. Indeks Sentralitas 3. Model Gravitasi	1. Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas yang dilakukan dengan menggunakan 30 jenis fasilitas yang dijadikan sebagai 25relative25 terdapat 5 kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan pusat pertumbuhan yaitu : Kecamatan Siantar, Bandar, Tanah Jawa, Raya dan Bosar Maligas. 2. Berdasarkan hasil analisis gravitasi menunjukkan bahwa kecamatan Siantar memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Bandar dengan Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Tanah Jawa dengan Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Panei, dan Kecamatan Bosar Maligas dengan Kecamatan Bandar.
2.	Zulfa Emalia dan Isti Farida 2018	Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung	1. Analisis Skalogram 2. Indeks Sentralitas 3. Skala Ordinal 4. arcGIS	1. Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kapupaten Lampung Selatan merupakan wilayah pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung. 1. Kota Bandar Lampung memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Pesawaran. Selain itu Kabupaten Lampung Tengah memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung.
3.	Danu Hadi Basito 2017	Penentuan Pusat Pertumbuhan Pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kediri Provinsi Jawa Timur	1. Analisis LQ 2. Shift Share 3. Analisis Tipologi Klassen 4. Analisis Skalogram	1. Kota Kediri merupakan daerah unggulan dengan basis kemampuan wilayah tertinggi dengan nilai basis 2,753 dan menjadi daerah dengan klasifikasi tertinggi. 2. Kabupaten Trenggalek merupakan daerah unggulan dari segi keunggulan kompetitif atas keunggulan lokasional wilayah tertinggi dengan nilai sebesar 70,139 miliar rupiah.

			5. Model Gravitasi	<p>3. Kabupaten Nganjuk merupakan daerah dengan ondeks sentralitas paling tinggi.</p> <p>4. Kabupaten Kediri merupakan daerah unggulan dari segi kekuatan interaksi antar wilayah.</p>
4	Sugiyanto dan Sukei	Penelitian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau	<p>1. Indeks sentralitas</p> <p>2. Analisis Skalogram</p> <p>3. Data Primer (Kuesioner)</p>	5 kecamatan yang potensial dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah a) Kecamatan Bulik, b) Kecamatan Lamandau, c) Kecamatan Delang, d) Kecamatan Belantikan Raya e) Kecamatan Sematu Jaya.
5	Unggul Priyadi Dan Eko Atmadji 2017	Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>1. Analisis Skalogram</p> <p>2. Analisis Konsentrasi Geografi</p> <p>3. Analisis Gravitasi</p>	Pada tahun 2013 terdapat empat kabupaten kota yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta, dengan Kabupaten Kulonprogo sebagai hinterland Kabupaten Bantul. Sedangkan tahun 2016 ada tiga kabupaten / kota yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dengan hinterland dari Kabupaten Bantul adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo.
6	Eta Rahayu Dan Eko Budi Santoso 2014	Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Gunungkidul	<p>1. Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas</p> <p>2. Tipologi Klassen</p>	<p>1. Dari 18 kecamatan, kecamatan yang tidak layak menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana prasarana terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Purwosari.</p> <p>2. Dari 15 kecamatan, kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ekonomi adalah Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Karangmojo.</p>
7	Imelda 2013	Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Daerah Hinterland	<p>1. Analisis Skalogram</p>	Pusat pertumbuhan primer di Kota Palembang adalah Kecamatan Ilir Timur I dan II, Sekunder adalah Kecamatan Ilir Barat 1 dan II, Sukarami, Kalidoni, Seberang Ulu 2 dan

		Kota Palembang		Sako.
8	Rifki Alvian Syafi'I dan Eko Budi Santoso 2015	Identifikasi Kemampuan Pelayanan Ekonomi dan Aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal Ngasem di Kabupaten Kediri	1. Analisis Skalogram 2. coefficient of reproducibility (CR)	1. Kemampuan pelayanan ekonomi Ngasem yang ditinjau dari ketersediaan infrastruktur ekonomi dinilai 27elative baik. Kemampuan pelayanan ekonomi Ngasem ditinjau dari ketersediaan infrastrukturnya masih dibawah Pare dan Ngadiluwih. 2. Ngasem termasuk pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas tinggi ditunjukkan 27elative kecilnya kesenjangan antara nilai tertinggi dengan terendah yang dibandingkan Kecamatan Pare. 3. Secara keseluruhan, kemampuan pelayanan Ngasem sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang diukur dari ketersediaan infrstruktur sudah memenuhi dan 27elative baik dengan aksesibilitas yang tinggi. Sehingga Ngasem memiliki dasar yang kuat untuk dikembangkan menjadi CBD di Kabupaten Kediri
9	Sasya Danastri 2011	Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan	1. Analisis Skalogram 2. Model Gravitasi 3. Metode Overlay	1. Berdasarkan hasil analisis skalogram urutan kelurahan dengan fasilitas terlengkap adalah Kelurahan Kecapi, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Kalijaga, Kelurahan larangan, dan Kelurahan Argasanya sebagai kelurahan yang jumlah fasilitasnya paling sedikit. 2. Bredasarkan hasil analisis gravitasi, semua daerah di Kecamatan Harjamukti memiliki interaksi yang kuat dengan daerah pusat kecamatan yaitu Kelurahan Kalijaga. 3. Berdasarkan teknik overlay, Kelurahan Kecapi merupakan kelurahan dengan kelengkapan fasilitas tertinggi, interaksi tertinggi, dan memiliki potensi perdagangan dan jasa dan Kelurahan Argasanya sebagai wilayah yang memiliki kelengkapan faslitas paling rendah.
10	Didi Setiawan,	Analisis Fungsi	1. Analisis	1. Kecamatan Ranomeeto berada pada hierarki pertama, di

	Zainuddin Saenong, dan Ulfa Matoka 2016	Pelayanan Kecamatan- Kecamatan Di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan	Skalogram 2. Analisis Gravitasi	ukur dari penyebaran jumlah dan keragaman fasilitas pelayanan. 2. Tingkat interaksi antar kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa Kecamatan Konda dan Kecamatan Moramo memiliki jangkauan pelayanan lebih luas karena dapat menjangkau sejumlah tiga kecamatan dari tujuh kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Ditinjau dari Pusat pelayanannya Kecamatan Ranomeeto sebagai pusat utama yaitu dengan IST tertinggi.
11	Renhard Gultom dan R. Mulyo Hendaro 2014	Analisis Penetapan Wilayah Pembangunan Di Kabupaten Samosir	1. Metode LQ 2. Analisis Shift-share 3. Metode Campuran 4. Metode Gravitasi 5. Analisis Skalogram	Terdapat 3 wilayah pembangunan di Kabupaten Samosir yaitu: b. Wilayah Pembangunan I (WP I) yaitu Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjurnmulamura, Kecamatan Harian, dan Kecamatan Ronggurnihuta 2. Wilayah Pembangunan II (WP II) yaitu Kecamatan Simanindo 3. Wilayah Pembangunan III (WP III) yaitu Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Onanrunggu dan Kecamatan Siotio.
12	Nur Budi Setiawan 2014	Distribusi Fungsi Pelayanan Kecamatan Dan Interaksi Antar Kecamatan Pada Satuan Wilayah Pembangunan (Swp) Di Kabupaten Tegal	1. Analisis Skalogram 2. Metode Gravitasi 3. Metode Overlayed	1. Kecamatan yang memiliki fasilitas yang tinggi atau Hirarki I adalah Kecamatan Adiwerna dan terendahnya adalah Kecamatan Talang. 2. Tingkat interaksi menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah tingkat interaksi tertinggi adalah Kecamatan Margasari dengan jumlah interaksi tertinggi di 8 Kecamatan dan Kecamatan yang memiliki jumlah Interaksi Terendah adalah Kecamatan Talang dengan jumlah Interaksi tertinggi di 3 Kecamatan.

				3. Keterkaitan antara Distribusi fungsi pelayanan dengan Interaksi antar wilayah menunjukkan semakin rendah jumlah fasilitas suatu Kecamatan maka semakin tinggi tingkat interaksi dengan Kecamatan lainnya.
13	Halima Tussa'diah 2013	Analisis Skalogram Guttman Kabupaten Blora	1. Analisis Skalogram 2. Metode GIS	Orde I : Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. Orde II : - Orde III :Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Jepon, Kecamatan Todanana, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Jati. Orde IV :Kecamatan Kedungtuban dan Kradenan. Orde V: :Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambong, Kecamatan Japah, dan Kecamatan Bogorejo
14	Nurlina dan Ayu Ridha Br. Ginting 2018	Analisis Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Aceh	1. Analisis Skalogram 2. Analisis Gravitasi 3. Indeks Sentral	1. Analisis skalogram dan sentralisasi diketahui bahwa yang berada pada skala I atau daerah pusat pertumbuhan adalah Aceh Tenggara, Banda Aceh dan Aceh Utara. 2. Hasil interaksi wilayah kabupaten/kota, untuk pusat pertumbuhan Kabupaten Aceh Tenggara didukung oleh Kabupaten Gayo Lues, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Selatan. Pusat pertumbuhan Kabupaten Aceh Utara didukung oleh Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireun. Pusat pertumbuhan Kota Banda Aceh didukung oleh Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya. Pusat pertumbuhan Kabupaten Aceh Tamiang didukung Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Pusat pertumbuhan Aceh Besar didukung Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya

15	Erwin Harahap 2009	Kecamatan Perbaungan Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Serdang Bedagai	1. Metode Trend 2. Standar Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota	<p>1. Keadaan Saat ini di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007 terdapat sebanyak 99.777 jiwa atau sekitar 16,12 % dan setelah melakukan penelitian dan di proyeksi ke depan jumlah penduduk di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2008 sebesar 104.310 jiwa, pada tahun 2009 sebesar 109,050 jiwa, pada tahun 2010 sebesar 114,310, pada tahun 2011 sebesar 119,186 jiwa, pada tahun 2012 sebesar 124.602 jiwa, pada tahun 2013 sebesar 130,264 jiwa dan pada tahun 2014 sebesar 136,184 jiwa.</p> <p>2. Di dalam penyediaan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Perbaungan, di mana sarana prasarana Pendidikan perlu penambahan sarana gedung sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) sebanyak 66 unit, untuk penambahan sarana gedung Sekolah Dasar (SD) sebanyak 65 unit, dan untuk penambahan sarana gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 25 unit. Penyediaan sarana prasarana Kesehatan yang ada di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sampai tahun 2014 berdasarkan hasil analisis dalam penelitian, perlu penambahan sebanyak 31 unit di mana Puskesmas sebanyak 1 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 14 unit, Balai Pengobatan Umum sebanyak 4 unit dan Praktek Dokter sebanyak 12 Unit. Tingkatan kerja, yaitu Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2008 sebanyak 15.609 Jiwa di mana Pertumbuhan sebanyak 0,009674 % dari hasil analisis dapat di hitung dengan Metode Trend bahwa proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja pada tahun 2014 sebanyak 16.681 jiwa.</p>
----	-----------------------	--	---	--

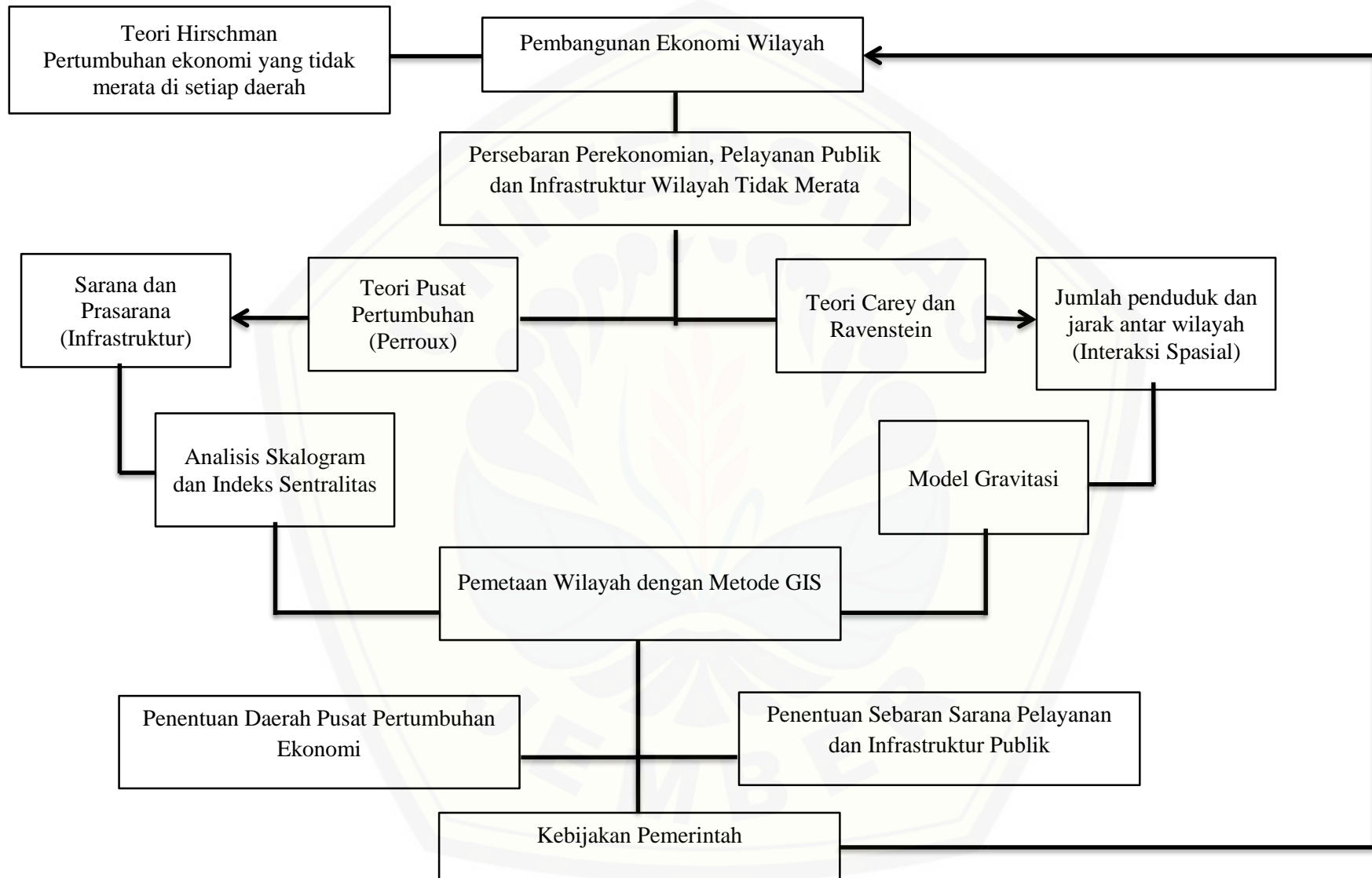
2.3 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Tabel Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Unggul Priyadi Dan Eko Atmadji Tahun 2017	Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel : 1. Sarana pendidikan 2. Sarana kesehatan 3. Tempat ibadah 4. Sarana perekonomian	Metode : 1. Penggunaan metode analisis konsentrasi geografis pada jurnal oleh Unggul Priyadi
2	Pandapotan T.P Nainggolan Tahun 2015	Analisis Penentuan Pusat- Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalongun	Metode dan Variabel yang digunakan sama dengan rencana penelitian	Metode : Penggunaan metode ArcGIS pada rencana penelitian
3	Zulfa Emalia dan Isti Farida Tahun 2018	Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung	Metode dan Variabel yang digunakan sama dengan rencana penelitian	Lokasi penelitian yang berbeda dengan rencana peneliti yaitu antara kabupaten dan kecamatan
4	Sugiyanto & Sukesi	Penelitian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau	Lokasi penelitian yang sama – sama menganalisis sentralitas Kecamatan di sebuah Kabupaten	Penggunaan data primer (kuesioner) pada metode penelitian Sugiyanto dan Sukesi

2.4 Kerangka Konseptual

Konsep penentuan pusat pertumbuhan ekonomi dianggap mampu untuk memudahkan dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah secara efisien. Unsur penting dalam penentuan pertumbuhan ekonomi yaitu adanya aglomerasi dan desentralisasi yang menyebabkan aktivitas atau kegiatan ekonomi menyebar ke seluruh wilayah (Sjafrizal, 2008: 149). Berikut adalah kerangka konseptual yang melatarbelakangi penelitian ini



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian disajikan dalam angka – angka yang merupakan aspek dari penelitian kuantitatif dan kemudian dijelaskan melalui metode deskriptif untuk menjelaskan hubungan antar variable yang terkait. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat (pengguna data) oleh lembaga pengumpul data (Kuncoro, 2009). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari badan statistik ekonomi, seperti BPS Kabupaten Kediri dan instansi terkait.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana umum yang tersedia dan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan, ekonomi dan keuangan, hotel dan pariwisata, komunikasi, tempat peribadatan, dan keamanan dalam satu kecamatan serta jarak antar kecamatan di dalam Kabupaten Kediri.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Skalogram Dan Indeks Sentralitas

Analisis Skalogram merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah berarti wilayah tersebut semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ada didaerah itu seperti fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan pemerintahan. Dengan analisis skalogram dapat ditentukan daerah ataupun kecamatan yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.

Kecamatan yang memiliki kelengkapan fasilitas tertinggi dapat ditentukan sebagai pusat pertumbuhan. (Rodinelli dalam Ermawati, 2010:47).

Tahapan penyusunan analisis skalogram menurut Rondinelli dan Budiharsono dalam Mulyadi (2007:40) sebagai berikut: (1) Membuat urutan kota berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri table, (2) Membuat urutan fasilitas yang ditentukan berdasarkan frekuensi pada bagian atas, (3) Menggambar garis kolom dan baris sehingga lembar kerja tersebut membentuk matriks yang menampilkan fasilitas yang ada pada masing-masing wilayah kota, (4) Menggunakan tanda (1) pada sel yang menyatakan keberadaan suatu fasilitas pada suatu wilayah dan tanda (0) pada sel yang tidak memiliki fasilitas, (5) Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi keberadaan fasilitas, semakin banyak banyak fasilitas yang ada pada suatu wilayah kota, maka wilayah tersebut berada di urutan atas, semakin banyak wilayah yang memiliki fasilitas tersebut, maka jenis fasilitas tersebut berada pada kolom sebelah kiri, (6) Mengalikan kolom-kolom yang telah disusun dengan nilai indeks sentralitas masing-masing kemudian disusun ulang seperti langkah lima, (7) Langkah terakhir yaitu mengidentifikasi peringkat/hirarki kota yang dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai keberadaan fasilitas pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilainya, maka hirarki kota tersebut akan semakin tinggi.

Kemudian, Indeks sentralitas (*Centrality Indeks Analysis*) merupakan langkah lanjutan dari analisis skalogram yang dalam analisisnya tidak hanya berdasarkan jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan yang ada pada suatu wilayah, tetapi juga berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada wilayah yang ditinjau. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu (Mutaali, 2003) dengan rumus

$$C = (x/X)$$

Keterangan :

C = bobot atribut fungsi x

X = jumlah total fungsi dalam sistem

x = Nilai sentralitas gabungan = 100

Indikator yang digunakan dalam penyusunan pusat dan hirerarki pada penelitian

ini adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas ibadah dan lembaga kemasyarakatan, fasilitas pasar, perbankan, telekomunikasi dan lainnya.

3.2.2 Analisis Gravitasi

Untuk mengukur daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah atau besarnya interaksi antar daerah dapat dilakukan dengan analisis gravitasi. Analisis gravitasi dilandaskan pada asumsi bahwa interaksi antara dua pusat mempunyai hubungan proporsional langsung dengan “massa” dari pusat-pusat bersangkutan dan mempunyai hubungan proporsional terbalik dengan “jarak” antara pusat-pusat tersebut. Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur “massa” dan “jarak” adalah tergantung pada persoalan yang hendak dicapai dan ketersediaan data. Variabel yang dapat mewakili “massa” antara lain; penduduk, kesempatan kerja, pendapatan, pengeluaran, sementara variabel yang dapat mewakili “jarak” dinyatakan dalam ukuran fisik, waktu, harga dan lain-lain (Glasson dalam Paul Sitohang; 1990:27). Pada perkembangannya variabel yang sering digunakan untuk mengetahui daya tarik atau kekuatan interaksi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk dan jarak kedua daerah tersebut.

Rumus gravitasi yang pada umumnya digunakan yaitu (Tarigan, 2010. 105):

$$I_{ij} = k \frac{p_i p_j}{d_{ij}^b}$$

Rumus gravitasi tersebut dapat disederhanakan menjadi (Daldjoeni dalam Ermawati, 2010:51)

$$I = \frac{p_1 p_2}{d_{ij}}$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara kota/wilayah A dan B

P1 = jumlah penduduk kota/wilayah i (ribuan jiwa)

P2 = jumlah penduduk kota/wilayah j (ribuan jiwa)

d_{ij} = jarak antara daerah i dan j (Km)

k = bilangan konstanta berdasarkan pengalaman

b = pangkat dari d_{ij} yang sering digunakan adalah b = 2

Semakin besar angka interaksi yang diperoleh oleh suatu wilayah maka semakin erat hubungan wilayah tersebut dengan daerah lainnya. Dalam hal ini berarti semakin potensial daerah tersebut untuk berkembang karena keterkaitan antar kegiatan ekonominya erat.

3.2.3 Metode GIS

Proses analisis dengan GIS adalah proses menggabungkan informasi dari beberapa layer data yang berbeda dengan menggunakan operasi spasial tertentu dimana kita memulai dari ide yang kita kembangkan dan diaplikasikan dalam berbagai hal. Kegunaannya aplikasi ini untuk menampilkan data spasial, membuat peta, serta melakukan analisis data spasial (Siregar, 2014).

Pendekatan SIG dengan menggunakan software arcGIS adalah suatu teknik analisis spasial yang dipergunakan dalam menganalisa kajian keruangan/spasial. *Overlay* atau tumpang susun peta atau *superimposed* peta digunakan untuk menentukan kendala, daerah limitasi dan kemungkinan pengembangan dalam penyusunan peta. *Buffering* dan *query* berguna untuk menampilkan, mengubah, dan menganalisis data. *Spasial query* merupakan peran yang penting sesuai dengan tujuan atau kebutuhan para penggunanya (Syawaludin Alisyahbana Harahap dan Iksal Yanuarsah, 2012). Dalam melakukan analisis dilakukan beberapa langkah:

1. Menentukan permasalahan/pertanyaan kunci
2. Mengumpulkan dan Menyiapkan data
3. Menentukan metode dan alat analisis
4. Melakukan proses analisis
5. Memeriksa dan memperbaiki hasil-hasil analisis tersebut.

Analisis dilakukan dengan tahapan tersebut dengan diawal oleh menentukan permasalahan atau pertanyaan kunci sebagai leading dalam melakukan analisis. Dalam kaitan tata ruang misalnya; Bagaimana zonasi yang tepat untuk menentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya? Ini merupakan pertanyaan kunci yang kemudian bisa dijabarkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail : (1) bagaimana status zonasi berdasarkan tata ruang

sebelumnya, (2) bagaimana kondisi tutupan lahan yang ada, (3) bagaimana tata penggunaan lahan yang ada, (4) bagaimana sebaran wilayah penting untuk konservasi, (5) bagaimana sebaran wilayah penting pengembangan ekonomi, (6) bagaimana sebaran penduduk, dan (7) bagaimana sebaran fasilitas-fasilitas bagi masyarakat.

3.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang menjadi subyek penelitian meliputi jumlah penduduk, jarak antar wilayah, fasilitas.

1. Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di Kabupaten Kediri yang berjumlah 26 kecamatan.

2. Jarak

Jarak merupakan variabel yang sering digunakan untuk mengetahui daya tarik atau kekuatan interaksi yang dimiliki antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jarak merupakan variabel yang dapat dinyatakan dalam ukuran fisik, waktu, harga dan lain-lain. Dalam penelitian ini jarak dinyatakan dalam ukuran fisik (km).

3. Fasilitas

Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah berarti wilayah tersebut semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah itu seperti fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan pemerintahan. Dalam penelitian ini total keseluruhan fasilitas yang digunakan adalah 29 jenis fasilitas. Jenis fasilitas yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 29 fasilitas, yaitu (1) TK, (2) SD/Mi, (3) SMP/ sederajat, (4) SMA/ sederajat, (5) PT, (6) SLB, (7) Rumah Sakit, (8) Rumah Sersalin, (9)

Puskesmas, (10) Puskesmas Pembantu, (11) Posyandu, (12) Pasar, (13) Restoran, (14) Swalayan/Toserba, (15) Minimarket, (16) Toko/Warung Kelontong, (17) IMK, (18) Bank Umum, (19) Bank Swasta, (20) BPR, (21) Kospin, (22) Hotel, (23) Internet Kantor Desa, (24) Kantor Pos, (25) Masjid, (26) Gereja Kristen, (27) Gereja Katolik, (28) Pura, (29) Polsek.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data – data yang telah dihimpun oleh peneliti dan kemudian diolah dengan metode analisis yang telah ditentukan, maka dari penelitian ini dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas yang telah dilakukan dengan menggunakan 29 jenis fasilitas yang ada menghasilkan 6 hierarki daerah berdasarkan ketersediaan jenis fasilitas di setiap kecamatan. Kecamatan Pare dan Kecamatan Ngasem yang merupakan daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik di Kabupaten Kediri. Kecamatan Pare menduduki hierarki I dengan jumlah 29 jenis fasilitas dan nilai sentralitas tertinggi yaitu sebesar 196,24. Kecamatan Ngasem menduduki hierarki II dengan jumlah 27 jenis fasilitas dan nilai sentralitas tertinggi kedua yaitu sebesar 169,1.
2. Hasil analisis gravitasi yang dilakukan menunjukkan Kecamatan Pare sebagai daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik memiliki interaksi terkuat dengan Kecamatan Badas yaitu sebesar 227650778676, Kecamatan Kepung sebesar 57891709,03, dan Kecamatan Plemahan sebesar 49432890,75. Kecamatan Ngasem sebagai daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik memiliki nilai interaksi terkuat dengan Kecamatan Pagu dengan nilai interaksi sebesar 162532615,6, Kecamatan Kayenkidul dengan nilai interaksi sebesar 83256860,83, dan Kecamatan Gurah dengan nilai interaksi sebesar 67504451,11.
3. Hasil pemetaan dengan menggunakan metode GIS dapat diketahui bahwa Kecamatan Pare dan Kecamatan Ngasem sebagai pusat pertumbuhan memiliki nilai interaksi paling kuat dengan kecamatan atau wilayah di sekitarnya yang mempunyai jarak terdekat. Semakin dekat jarak kedua wilayah maka semakin besar nilai interaksi yang dihasilkan oleh kedua wilayah tersebut. Sedangkan kecamatan yang tidak berbatasan secara

langsung atau jaraknya yang jauh menciptakan suatu nilai interaksi yang lemah.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kediri diharapkan mampu membangun atau memperbaiki sarana fasilitas penunjang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kediri wilayah selatan karena daerah tersebut memiliki sarana fasilitas yang kurang mendukung dan jaraknya yang cukup jauh dari daerah pusat pertumbuhan dan pelayanan publik yaitu Kecamatan Pare dan Kecamatan Ngasem. Hal ini bertujuan agar wilayah Kabupaten Kediri bagian selatan mempunyai daerah pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi ketimpangan lokal yang ada.
2. Penentuan pusat pertumbuhan dan pelayanan publik diharapkan mampu mendukung proses percepatan pertumbuhan ekonomi melalui program pemerintah yang ada. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan sebagai pertimbangan untuk proses pembentukan RTRW Kabupaten Kediri di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Benjamin dan Jana Marie Mehrrens. 2007. *Regional Marketing*. Jakarta : Konrad Adenauer Stiftung.
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2018. *Kabupaten Kediri Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Mojo Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Semen Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Ngadiluwih Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Krass Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Ringinrejo Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Kandat Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Wates Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Ngancar Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Plosoklaten Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Gurah Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Puncu Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri..
- _____, 2018. *Kecamatan Kepung Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Kandangan Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Pare Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Badas Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.

- _____, 2018. *Kecamatan Kunjang Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Plemahan Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Purwoasri Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Papar Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Pagu Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Kayenkidul Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Gampengrejo Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Ngasem Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Banyakan Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- _____, 2018. *Kecamatan Tarokan Dalam Angka Tahun 2018*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Danis. 2004. *A Dictionary of Economics*. Inggris : Penguin LTD.
- Emilia, Zulfa dan Isti Farida. 2018. Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. 19 (1).
- Glasson, J. 1974. *An Introduction to Regional Planning*. Hutchinson Educational, London.
- Gultom, Renhard dan R. Mulyo Hendarto. 2014. Analisis Penetapan Wilayah Pembangunan Di Kabupaten Samosir. *Diponegoro Journal Of Economics*. 3 (1): 1-11.
- Harahap, Erwin, 2009. Kecamatan Perbaungan Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*. Medan : Sekolah Pascasarjana Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Universitas Sumatera Utara.
- Hirschman, A. O. 1958. *The Strategy of Development*. New Haven CN: Yale University Press.

- Imelda. 2013. Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Daerah Hinterland Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 11 (1): 54 – 66.
- John B. Parr, 1999. *Growth-Pole Strategies In Regional Economic Planning: A Retrospective View Part 1. Origins And Advocacy. Urban Studies*, Juni 1999 Vol. 36 No. 7.
- Komarovski, Viktor Dan Viktor Bondaruk, 2013. *The Role Of The Concept Of "Growth Poles" For Regional Development*. Odessa Regional Institute Of Public Administration Of National Academy Of Public Administration, Office Of The President Of Ukraine Odessa, Ukraine.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis? Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Lee, E. S. (1966). *A Theory of Migration Demography*. 3(1): 47-57.
- Pandapotan T.P Nainggolan. 2015. Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. 1(12).
- Perroux, F. 1955. *Note Sur la Notion de Pole de Croissance. Economique Appliquee*. France: Press Universitives de France.
- Priyadi, U. & Eko Atmaji. 2017. Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 2(02).
- Rahayu, Eta dan Eko Budi Santoso. 2014. Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Teknik Pomits*. 3(2).
- Ravenstein, E. G. (1885). *The Laws of Migration. Journal of the statistical society of London*. 48(2): 167-235
- Siregar, Sabrina. (2014). Makalah Singkat Tentang Software ArcGIS. <http://www.sabrinahelper.wordpress.com> (Diakses pada 23 November 2018)
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Padang: Badouse Media.
- Tarigan, R., 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara
- _____, 2006. *Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi*. Edisi Revisi III. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi V. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro & Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi (Terjemahan)*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kediri (Lapangan Usaha) (Persen) menurut Harga Konstan 2010

Sektor PDRB	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB (Lapangan Usaha) (Persen) Harga Konstan 2010					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.75	4.77	2.27	3	2.94	3
B. Pertambangan dan Penggalian	6.46	1.28	1.64	2.03	2.21	2.34
C. Industri Pengolahan	5.55	4.49	4.54	6.15	6.11	5.85
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.95	8.04	2.10	3.93	2.39	4.44
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7	5.74	7.04	2.74	5.28	5.18
F. Konstruksi	6.86	7.43	8.15	5.94	3.03	4.76
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.40	8.05	8.80	5.69	5.04	5.74
H. Transportasi dan Pergudangan	8.31	8.52	9.52	9.59	6.51	6.92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.26	6.27	7.27	6.85	6.94	7.01
J. Informasi dan Komunikasi	8.91	10.68	11.98	10.58	11.03	7.46
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8.53	9.37	10.93	6.57	4.95	5.49
L. Real Estate	8.48	6.89	7.27	6.69	4.98	5.20
M,N. Jasa Perusahaan	5.25	6.11	8.60	7.25	5.44	5.74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.58	3.17	2.48	0.64	4.02	4.42
P. Jasa Pendidikan	3.18	6.86	6.37	6.16	6.26	5.77
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.53	9.65	7.02	9.54	3.93	5.49
R,S,T,U. Jasa lainnya	5.95	5.60	6.77	6.80	4.88	5.19
PDRB	6.03	6.11	5.82	5.32	4.88	5.02
PDRB Tanpa Migas	6.03	6.11	5.82	5.32	4.88	5.02

Lampiran 3. Tabel Jenis Fasilitas tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri

No	Nama Kecamatan	Pendidikan						Kesehatan				
		TK	SD/Mi	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	PT	SLB	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
1	Mojo	63	55	10	5	0	0	0	3	2	2	82
2	Semen	24	34	4	2	0	0	0	0	1	2	58
3	Ngadiluwih	45	36	9	6	0	1	1	1	2	5	109
4	Krass	48	38	9	6	0	1	0	3	2	3	90
5	Ringinrejo	30	30	3	1	1	2	0	0	1	2	84
6	Kandat	34	30	7	6	0	1	2	0	1	4	69
7	Wates	60	44	9	4	0	1	0	0	2	4	88
8	Ngancar	38	30	4	0	0	0	0	0	1	3	57
9	Plosoklaten	47	42	7	4	0	1	0	0	2	5	86
10	Gurah	56	49	11	6	0	1	1	0	2	5	103
11	Puncu	33	33	5	1	0	1	0	0	1	2	44
12	Kepung	52	50	16	10	1	1	1	0	2	4	87
13	Kandangan	46	38	7	3	0	1	1	1	1	4	65
14	Pare	51	48	20	19	4	1	4	6	3	3	117
15	Badas	46	37	14	8	0	2	0	0	1	2	70
16	Kunjang	19	22	6	3	0	1	0	0	1	3	58
17	Plemahan	35	34	8	4	0	1	1	0	1	4	80
18	Purwoasri	41	49	5	4	1	1	0	0	2	3	82
19	Papar	29	30	5	4	0	2	0	0	1	3	64
20	Pagu	25	25	5	1	0	1	1	1	1	2	37
21	Kayenkidul	29	24	2	0	0	1	2	1	2	3	70
22	Gampengrejo	32	19	2	0	0	0	0	1	1	2	47
23	Ngasem	27	23	5	4	1	1	2	1	1	3	73
24	Banyakan	46	30	6	0	0	0	0	0	1	3	78
25	Grogol	39	32	8	4	0	1	0	0	1	4	44
26	Tarokan	43	30	5	4	0	0	0	0	1	3	63
	Jumlah	1038	912	192	109	8	23	16	18	37	83	1905

No	Nama Kecamatan	Sarana Perdagangan						Ekonomi dan Keuangan				Hotel
		Pasar	Restoran	Swalayan/Toko Besar	Minimarket	Toko/Warung Kelontong	Industri Mikro dan Kecil	Bank Umum Pemerintah	Bank Swasta	BPR	Kospin	Hotel
1	Mojo	9	0	0	12	1328	236	2	0	4	0	1
2	Semen	3	3	0	1	485	326	1	0	3	1	6
3	Ngadiluwih	3	4	0	4	741	267	3	0	7	22	0
4	Krass	5	25	0	9	634	659	3	0	14	14	0
5	Ringinrejo	3	0	1	6	516	92	4	1	7	4	0
6	Kandat	5	0	0	4	441	401	1	0	2	9	0
7	Wates	2	0	0	7	858	434	7	2	5	18	0
8	Ngancar	2	4	0	1	229	59	1	0	3	11	0
9	Plosoklaten	4	0	0	5	787	123	2	1	10	9	0
10	Gurah	6	12	0	6	571	246	3	2	6	12	0
11	Puncu	3	0	0	6	632	707	1	0	2	13	0
12	Kepung	2	1	0	5	323	235	3	0	3	11	0
13	Kandangan	2	7	0	7	452	116	5	3	3	17	1
14	Pare	12	17	4	31	1380	290	9	5	9	89	4
15	Badas	4	3	0	0	6255	143	1	0	7	22	0
16	Kunjang	2	0	0	2	263	147	2	0	2	10	0
17	Plemahan	4	0	0	20	462	401	1	0	5	16	0
18	Purwoasri	5	1	0	7	372	267	3	1	2	12	0
19	Papar	1	3	0	5	544	147	2	1	3	3	0
20	Pagu	1	1	0	4	380	152	3	1	12	21	0
21	Kayenkidul	2	0	0	7	441	105	0	0	1	18	0
22	Gampengrejo	2	1	0	0	314	115	1	0	1	15	1
23	Ngasem	3	23	1	23	593	305	4	2	3	26	0
24	Banyakan	3	3	0	4	323	642	1	0	4	0	0
25	Grogol	4	3	1	7	575	256	4	1	5	23	0
26	Tarokan	3	0	0	4	627	516	1	0	0	16	0
	Jumlah	95	111	7	187	20526	7387	68	20	123	412	13

No	Nama Kecamatan	Komunikasi		Tempat Peribadatan			Keamanan		Jumlah
		Internet Kantor Desa	Kantor Pos	Masjid	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Pura	Polsek	
1	Mojo	20	1	139	5	1	0	1	1981
2	Semen	12	1	65	1	1	0	1	1035
3	Ngadiluwih	16	1	65	4	2	0	1	1355
4	Krass	13	1	88	3	0	0	1	1669
5	Ringinrejo	5	2	65	2	0	0	1	863
6	Kandat	0	1	61	4	0	1	1	1085
7	Wates	18	2	93	8	0	0	1	1667
8	Ngancar	0	1	52	11	2	2	1	512
9	Plosoklaten	15	1	78	20	1	1	1	1252
10	Gurah	11	1	126	10	1	1	1	1249
11	Puncu	8	0	50	7	1	7	1	1558
12	Kepung	0	1	85	12	1	5	1	912
13	Kandangan	12	1	65	12	0	10	1	881
14	Pare	2	2	92	18	3	5	1	2249
15	Badas	7	1	70	4	0	0	1	6698
16	Kunjang	12	1	59	3	1	0	1	618
17	Plemahan	15	1	86	4	0	0	1	1184
18	Purwoasri	23	1	75	4	0	0	1	962
19	Papar	0	1	58	4	1	1	1	913
20	Pagu	1	1	39	5	0	2	1	723
21	Kayenkidul	12	0	53	8	1	3	1	786
22	Gampengrejo	4	1	27	1	0	0	1	588
23	Ngasem	2	1	47	9	0	2	1	1185
24	Banyakan	9	1	76	4	3	0	1	1238
25	Grogol	9	1	50	2	2	2	1	1079
26	Tarokan	10	1	74	3	0	6	1	1411
	Jumlah	236	27	1838	168	21	48	26	

Lampiran 4. Tabel Bobot Jenis Fasilitas tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri

No	Nama Kecamatan	Pendidikan						Kesehatan				
		TK	SD/Mi	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	PT	SLB	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
1	Mojo	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
2	Semen	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
3	Ngadiluwih	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
4	Krass	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
5	Ringinrejo	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
6	Kandat	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
7	Wates	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
8	Ngancar	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
9	Plosoklaten	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
10	Gurah	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
11	Puncu	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
12	Kepung	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
13	Kandangan	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
14	Pare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Badas	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
16	Kunjang	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
17	Plemahan	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
18	Purwoasri	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
19	Papar	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
20	Pagu	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
21	Kayenkidul	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
22	Gampengrejo	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
23	Ngasem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Banyakan	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Grogol	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
26	Tarokan	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
	Jumlah	26	26	26	22	5	20	10	9	26	26	26
	Sentralitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bobot	3,85	3,85	3,85	4,55	20	5	10	11,11	3,85	3,85	3,85

No	Nama Kecamatan	Sarana Perdagangan						Ekonomi dan Keuangan				Hotel
		Pasar	Restoran	Swalayan/Toko Besar	Minimarket	Toko/Warung Kelontong	Industri Mikro dan Kecil	Bank Umum Pemerintah	Bank Swasta	BPR	Kospin	Hotel
1	Mojo	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
2	Semen	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
3	Ngadiluwih	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
4	Krass	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
5	Ringinrejo	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
6	Kandat	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
7	Wates	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
8	Ngancar	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
9	Plosoklaten	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
10	Gurah	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
11	Puncu	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
12	Kepung	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
13	Kandangan	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Pare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Badas	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
16	Kunjang	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
17	Plemahan	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
18	Purwoasri	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
19	Papar	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
20	Pagu	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
21	Kayenkidul	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
22	Gampengrejo	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
23	Ngasem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
24	Banyakan	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
25	Grogol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
26	Tarokan	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
	Jumlah	26	16	4	24	26	26	26	11	26	24	5
	Sentralitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bobot	3,85	6,25	25,00	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	20,00

No	Nama Kecamatan	Komunikasi			Tempat Peribadatan			Keamanan		Jumlah
		Internet Kantor Desa	Kantor Pos	Masjid	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Polsek		
1	Mojo	1	1	1	1	1	0	1	21	
2	Semen	1	1	1	1	1	0	1	22	
3	Ngadiluwih	1	1	1	1	1	0	1	24	
4	Krass	1	1	1	1	0	0	1	22	
5	Ringinrejo	1	1	1	1	0	0	1	23	
6	Kandat	0	1	1	1	0	1	1	21	
7	Wates	1	1	1	1	0	0	1	21	
8	Ngancar	0	1	1	1	1	1	1	20	
9	Plosoklaten	1	1	1	1	1	1	1	23	
10	Gurah	1	1	1	1	1	1	1	25	
11	Puncu	1	0	1	1	1	1	1	21	
12	Kepung	0	1	1	1	1	1	1	24	
13	Kandangan	1	1	1	1	0	1	1	26	
14	Pare	1	1	1	1	1	1	1	29	
15	Badas	1	1	1	1	0	0	1	20	
16	Kunjang	1	1	1	1	1	0	1	21	
17	Plemahan	1	1	1	1	0	0	1	21	
18	Purwoasri	1	1	1	1	0	0	1	23	
19	Papar	0	1	1	1	1	1	1	23	
20	Pagu	1	1	1	1	0	1	1	25	
21	Kayenkidul	1	0	1	1	1	1	1	22	
22	Gampengrejo	1	1	1	1	0	0	1	20	
23	Ngasem	1	1	1	1	0	1	1	27	
24	Banyakan	1	1	1	1	1	0	1	19	
25	Grogol	1	1	1	1	1	1	1	25	
26	Tarokan	1	1	1	1	0	1	1	20	
	Jumah	22	24	26	26	14	14	26		
	Sentralitas	100	100	100	100	100	100	100		
	Bobot	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85		

Lampiran 5. Tabel Perhitungan Indeks Sentralitas tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri berdasarkan Bobot Fasilitas

No	Nama Kecamatan	Pendidikan						Kesehatan				
		TK	SD/Mi	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	PT	SLB	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
1	Mojo	3,85	3,85	3,85	4,55	0	0	0	11,11	3,85	3,85	3,85
2	Semen	3,85	3,85	3,85	4,55	0	0	0	0	3,85	3,85	3,85
3	Ngadiluwih	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	10	11,11	3,85	3,85	3,85
4	Krass	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	0	11,11	3,85	3,85	3,85
5	Ringinrejo	3,85	3,85	3,85	4,55	20	5	0	0	3,85	3,85	3,85
6	Kandat	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	10	0	3,85	3,85	3,85
7	Wates	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	0	0	3,85	3,85	3,85
8	Ngancar	3,85	3,85	3,85	0	0	0	0	0	3,85	3,85	3,85
9	Plosoklaten	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	0	0	3,85	3,85	3,85
10	Gurah	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	10	0	3,85	3,85	3,85
11	Puncu	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	0	0	3,85	3,85	3,85
12	Kepung	3,85	3,85	3,85	4,55	20	5	10	0	3,85	3,85	3,85
13	Kandangan	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	10	11,11	3,85	3,85	3,85
14	Pare	3,85	3,85	3,85	4,55	20	5	10	11,11	3,85	3,85	3,85
15	Badas	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	0	0	3,85	3,85	3,85
16	Kunjang	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	0	0	3,85	3,85	3,85
17	Plemahan	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	10	0	3,85	3,85	3,85
18	Purwoasri	3,85	3,85	3,85	4,55	20	5	0	0	3,85	3,85	3,85
19	Papar	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	0	0	3,85	3,85	3,85
20	Pagu	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	10	11,11	3,85	3,85	3,85
21	Kayenkidul	3,85	3,85	3,85	0	0	5	10	11,11	3,85	3,85	3,85
22	Gampengrejo	3,85	3,85	3,85	0	0	0	0	11,11	3,85	3,85	3,85
23	Ngasem	3,85	3,85	3,85	4,55	20	5	10	11,11	3,85	3,85	3,85
24	Banyakan	3,85	3,85	3,85	0	0	0	0	0	3,85	3,85	3,85
25	Grogol	3,85	3,85	3,85	4,55	0	5	0	0	3,85	3,85	3,85
26	Tarokan	3,85	3,85	3,85	4,55	0	0	0	0	3,85	3,85	3,85

No	Nama Kecamatan	Sarana Perdagangan						Ekonomi dan Keuangan				Hotel
		Pasar	Restoran	Swalayan/Toko Besar	Minimarket	Toko/Warung Kelontong	Industri Mikro dan Kecil	Bank Umum Pemerintah	Bank Swasta	BPR	Kospin	Hotel
1	Mojo	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	0	20
2	Semen	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	20
3	Ngadiluwih	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
4	Krass	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
5	Ringinrejo	3,85	0	25	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
6	Kandat	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
7	Wates	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
8	Ngancar	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
9	Plosoklaten	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
10	Gurah	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
11	Puncu	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
12	Kepung	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
13	Kandangan	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	20
14	Pare	3,85	6,25	25	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	20
15	Badas	3,85	6,25	0	0	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
16	Kunjang	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
17	Plemahan	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
18	Purwoasri	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
19	Papar	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
20	Pagu	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
21	Kayenkidul	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0
22	Gampengrejo	3,85	6,25	0	0	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	20
23	Ngasem	3,85	6,25	25	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
24	Banyakan	3,85	6,25	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	0	0
25	Grogol	3,85	6,25	25	4,17	3,85	3,85	3,85	9,09	3,85	4,17	0
26	Tarokan	3,85	0	0	4,17	3,85	3,85	3,85	0	3,85	4,17	0

No	Nama Kecamatan	Komunikasi		Tempat Peribadatan			Keamanan		Jumlah
		Internet Kantor Desa	Kantor Pos	Masjid	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Pura	Polsek	
1	Mojo	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	0	3,85	109,59
2	Semen	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	0	3,85	108,9
3	Ngadiluwih	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	0	3,85	115,01
4	Krass	4,55	4,17	3,85	3,85	0	0	3,85	97,87
5	Ringinrejo	4,55	4,17	3,85	3,85	0	0	3,85	134,6
6	Kandat	0	4,17	3,85	3,85	0	7,14	3,85	93,1
7	Wates	4,55	4,17	3,85	3,85	0	0	3,85	89,6
8	Ngancar	0	4,17	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	86,94
9	Plosoklaten	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	103,88
10	Gurah	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	120,13
11	Puncu	4,55	0	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	90,62
12	Kepung	0	4,17	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	126,49
13	Kandangan	4,55	4,17	3,85	3,85	0	7,14	3,85	144,1
14	Pare	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	196,24
15	Badas	4,55	4,17	3,85	3,85	0	0	3,85	82,59
16	Kunjang	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	0	3,85	87,65
17	Plemahan	4,55	4,17	3,85	3,85	0	0	3,85	90,51
18	Purwoasri	4,55	4,17	3,85	3,85	0	0	3,85	115,85
19	Papar	0	4,17	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	105,58
20	Pagu	4,55	4,17	3,85	3,85	0	7,14	3,85	124,1
21	Kayenkidul	4,55	0	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	107,18
22	Gampengrejo	4,55	4,17	3,85	3,85	0	0	3,85	104,15
23	Ngasem	4,55	4,17	3,85	3,85	0	7,14	3,85	169,1
24	Banyakan	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	0	3,85	80,18
25	Grogol	4,55	4,17	3,85	3,85	7,14	7,14	3,85	135,13
26	Tarokan	4,55	4,17	3,85	3,85	0	7,14	3,85	82,65

Lampiran 6. Tabel Nilai Indeks Sentralitas dan Hierarki tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri

Nama Kecamatan	Nilai Sentralitas	Hierarki	Nama Kecamatan	Nilai Sentralitas	Hierarki
Mojo	109,59	V	Pare	196,24	I
Semen	108,9	V	Badas	82,59	VI
Ngadiluwih	115,01	V	Kunjang	87,65	VI
Krass	97,87	VI	Plemahan	90,51	VI
Ringinrejo	134,6	IV	Purwoasri	115,85	V
Kandat	93,1	VI	Papar	105,58	V
Wates	89,6	VI	Pagu	124,1	IV
Ngancar	86,94	VI	Kayenkidul	107,18	V
Plosoklaten	103,88	V	Gampengrejo	104,15	V
Gurah	120,13	IV	Ngasem	169,1	II
Puncu	90,62	VI	Banyakan	80,18	VI
Kepung	126,49	IV	Grogol	135,13	IV
Kandangan	144,1	III	Tarokan	82,65	VI

Keterangan :

Banyak kelas = $1 + 3,3 \log n$

$1 + 3,3 \log 26$

$1 + 3,3 (1.414973348)$

$1 + 4.6694120483$

$5.6694120483 / 6$

Panjang Kelas = $\frac{\text{Nilai Sentralitas Tertinggi} - \text{Nilai Sentralitas Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$

$= \frac{196,24 - 80,18}{6}$

$= 19,34$

HIERARKI I	196,24 – 176,9
HIERARKI II	176,8 – 157,46
HIERARKI III	157,45 – 138,11
HIERARKI IV	138,10 – 118,76
HIERARKI V	118,75 – 99,41
HIERARKI VI	99,4 - 80,07

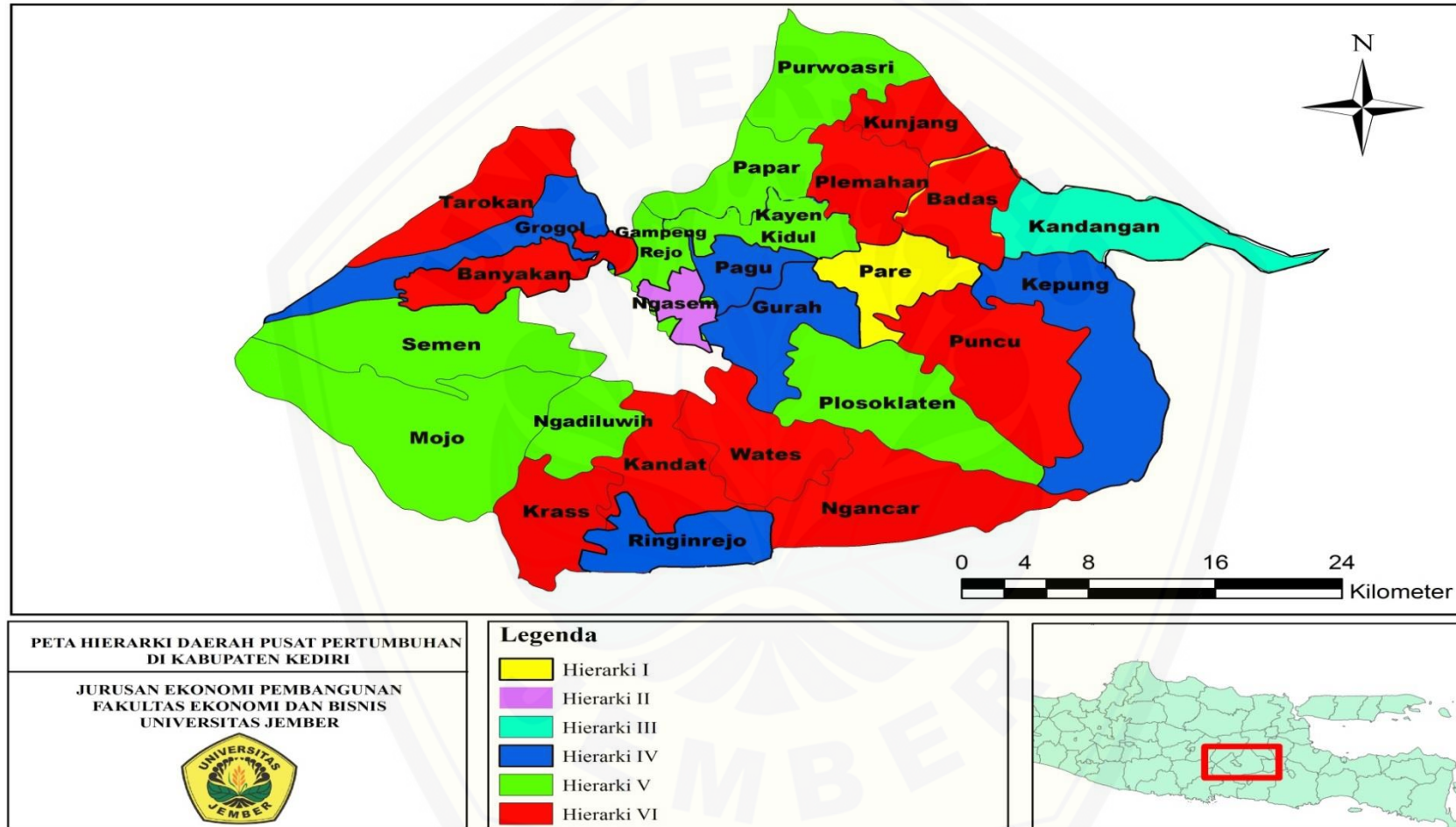
Lampiran 7. Tabel Nilai Interaksi Kecamatan Pare sebagai Daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan Lain

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jarak (km)	Nilai Interaksi
1	Pare	101861		
2	Mojo	75764	39	5073896,65
3	Semen	53494	40	3405595,209
4	Ngadiluwih	77551	35	6448508,091
5	Krass	59351	43	3269633,429
6	Ringinrejo	52287	42	3019277,838
7	Kandat	59098	38	4168823,669
8	Wates	87113	24	15405238,36
9	Ngancar	47178	32	4692967,049
10	Plosoklaten	69937	17	24650009,54
11	Gurah	81234	14	42217226,91
12	Puncu	60980	16	24263608,52
13	Kepung	81841	12	57891709,03
14	Kandangan	48304	12	34168706,56
15	Badas	62081	6	227650778676
16	Kunjang	34297	14	17824115,9
17	Plemahan	58721	11	49432890,75
18	Purwoasri	55559	16	22106622,26
19	Papar	50006	16	19897113,93
20	Pagu	38635	14	20078570,08
21	Kayenkidul	44529	15	20158970,97
22	Gampengrejo	34054	24	6022177,941
23	Ngasem	67310	25	10970022,26
24	Banyakan	54848	32	5455929,813
25	Grogol	46385	34	4087216,683
26	Tarokan	58974	37	4387984,378

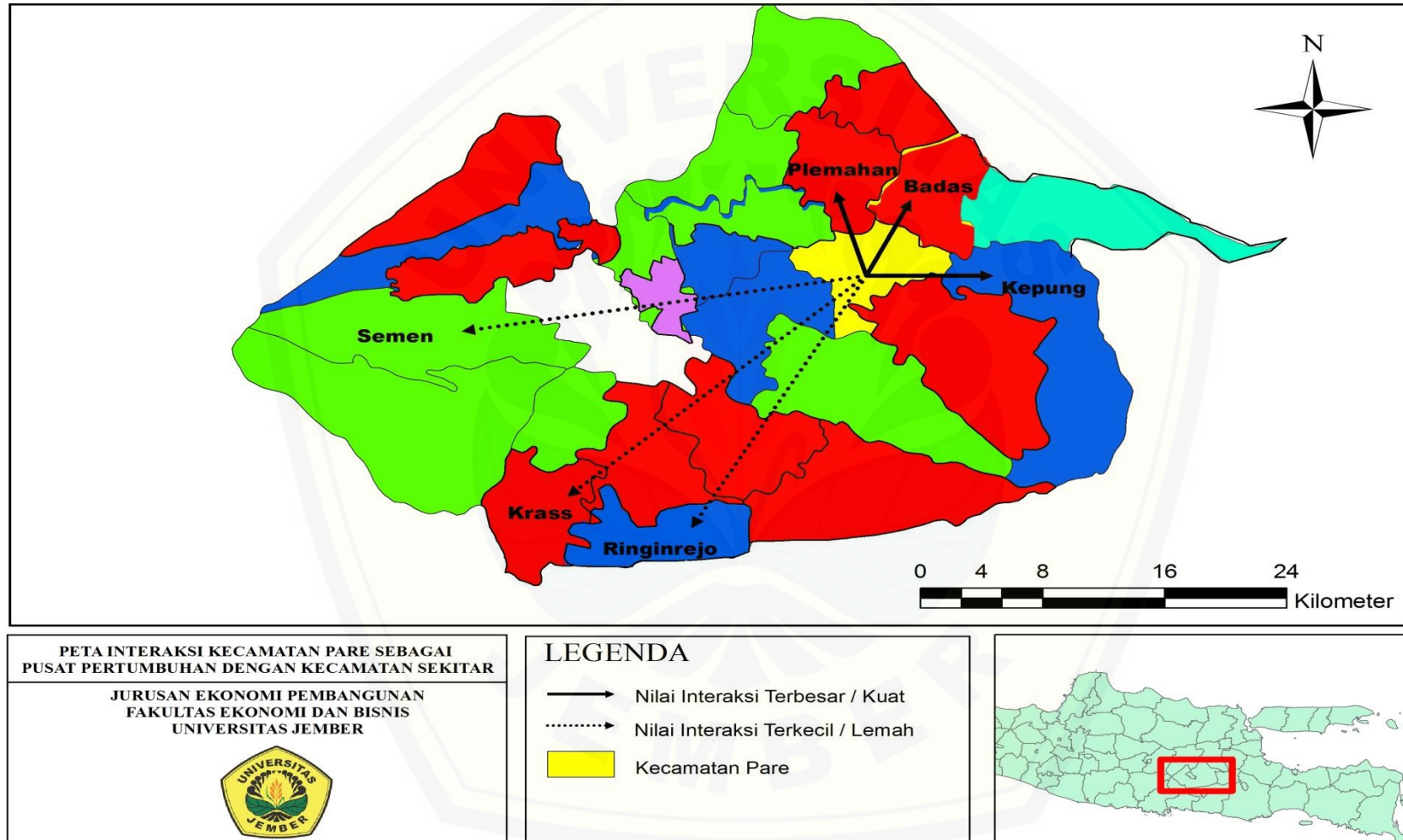
Lampiran 8. Tabel Nilai Interaksi Kecamatan Ngasem sebagai Daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan Lain

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jarak (km)	Nilai Interaksi
1	Ngasem	67310		
2	Mojo	75764	21	11563889
3	Semen	53494	23	6806580,6
4	Ngadiluwih	77551	18	16110981
5	Krass	59351	25	6391865,3
6	Ringinrejo	52287	24	6110135,4
7	Kandat	59098	20	9944716
8	Wates	87113	25	9381721,6
9	Ngancar	47178	32	3101124,2
10	Plosoklaten	69937	16	18388514
11	Gurah	81234	9	67504451
12	Puncu	60980	39	2698595,5
13	Kepung	81841	34	4765326,7
14	Kandangan	48304	36	2508751,7
15	Pare	101861	24	11903236
16	Badas	62081	28	5329938,9
17	Kunjang	34297	20	5771327,7
18	Plemahan	58721	14	20165870
19	Purwoasri	55559	22	7726603,9
20	Papar	50006	21	7632435,1
21	Pagu	38635	4	162532616
22	Kayenkidul	44529	6	83256861
23	Gampengrejo	34054	8	35815230
24	Banyakan	54848	16	14421168
25	Grogol	46385	20	7805435,9
26	Tarokan	58974	22	8201528,8

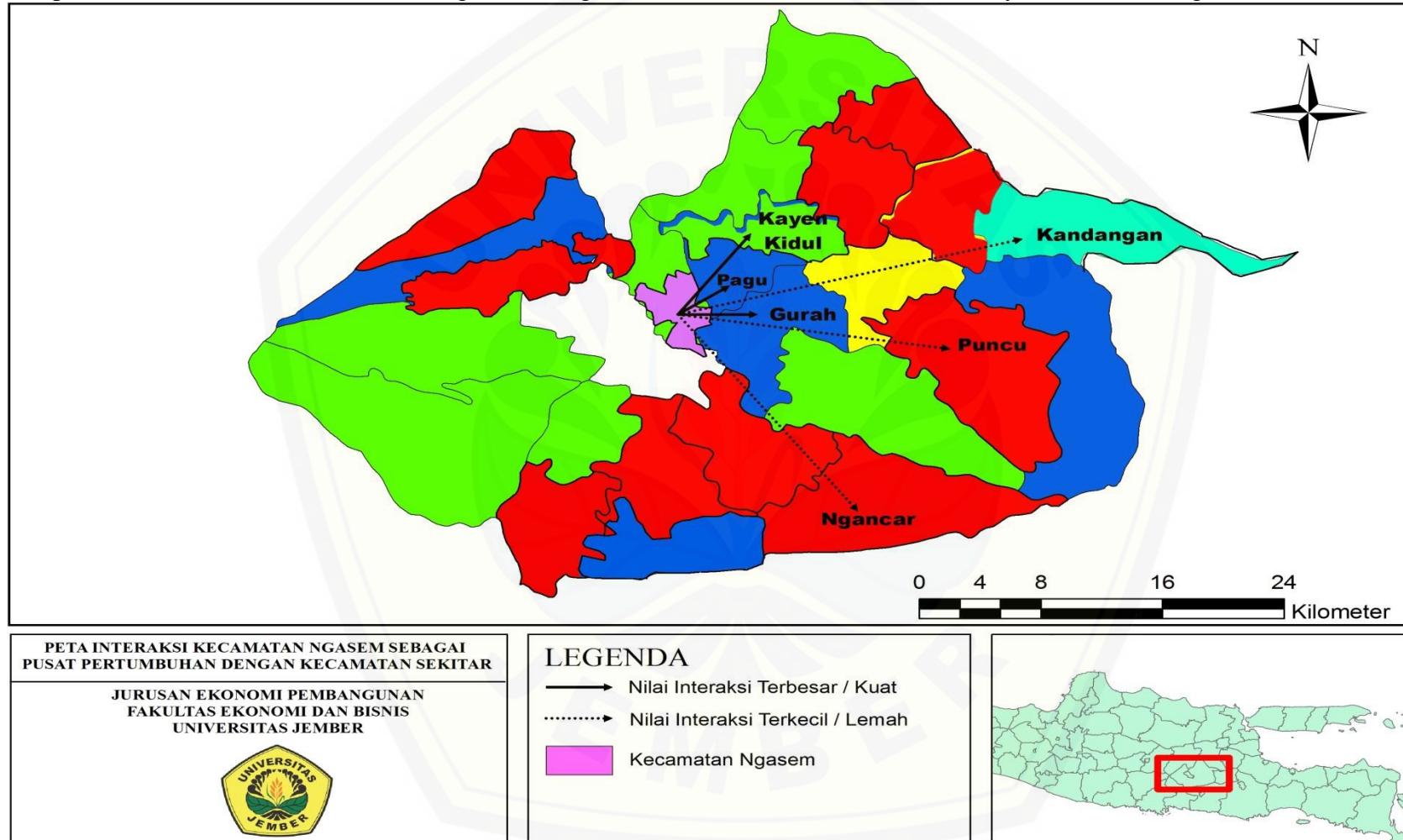
Lampiran 9. Peta Hierarki tiap Kecamatan di Kabupaten Kediri



Lampiran 10. Peta Interaksi Kecamatan Pare sebagai daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan lain



Lampiran 11. Peta Interaksi Kecamatan Ngasem sebagai daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik dengan Kecamatan lain



Lampiran 12. Peta Hierarki tiap Kecamatan dan Interaksi Daerah Pusat Pertumbuhan dengan Kecamatan Sekitar

